

**PERAN BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM)
ARTA KAWULA DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI
MASYARAKAT KELURAHAN KROBOKAN
KECAMATAN SEMARANG BARAT
KOTA SEMARANG**



Skripsi
Program Sarjana (S-1)
Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Oleh:
Rachmat Darul 'Adhim
1601046050

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
2020**

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 1 bendel
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth. Dekan
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

NAMA : Rachmat Darul 'Adhim
NIM : 1601046050
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)
Judul : Peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) ARTA KAWULA dalam Pengembangan ekonomi masyarakat Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 22 September 2020

Pembimbing

Bidang Substansi Materi



Dr. Agus Riyadi, S.Sos.I., M.S.I.
NIP. 198008162007101003

Bidang Metodologi dan Tata Tulis



Sulistio, S.A.g, M.Si.
NIP. 197002021998031005

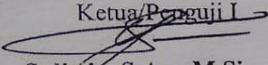
HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI
PERAN BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM)
DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT
KELURAHAN KROBOKAN KECAMATAN SEMARANG BARAT
KOTA SEMARANG

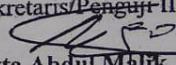
Disusun oleh:
Rachmat Darul 'Adhim
1601046050

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 7 September 2020 dan dinyatakan telah lulus memenuhi
syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Susunan Dewan Penguji

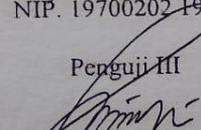
Ketua/Penguji I


Sulistio, S.Ag., M.Si
NIP. 19700202 199803 1 005

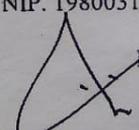
Sekretaris/Penguji II


Dr. Hatta Abdul Malik, MSI
NIP. 19800311 200710 1 001

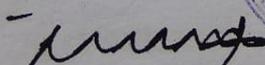
Penguji III


Suprihatiningsih, S.Ag., M.Si
NIP. 19760310 200501 2 001

Penguji IV


Drs. H. Kasmuri, M.Ag.
NIP. 19660822 199403 1 003

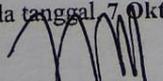
Pembimbing I


Dr. Agus Riyadi, M.S.I
NIP. 19800816 200710 1 003

Pembimbing II


Sulistio, S.Ag., M.Si
NIP. 19700202 199803 1 005

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Pada tanggal 7 Oktober 2020


Dr. Ilyas Supena, M.Ag.
NIP. 19720410 200112 1 005

2020-10-14 13:43

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rachmat Darul 'Adhim

NIM : 1601046050

Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Fakultas : Dakwah Dan Komunikasi

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi maupun di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 10 September 2020



Rachmat Darul 'Adhim

NIM: 1601046050

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang selalu senantiasa memberikan rahmat, serta hidayahNya kepada penulis dalam rangka menyelesaikan karya skripsi dengan judul “Peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) ARTA KAWULA dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang.” Karya skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat sarjana sosial (S.Sos) bidang Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga mendapat syafa’at di hari kiamat Aamiin. Dalam wujud syukur, penulis menyadari dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini penulis ingin mempersembahkan skripsi kepada semua pihak yang terlibat sebagai sumber motivasi dan tidak lepas dari adanya bantuan doa dan bimbingan semua pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis maka suatu keharusan bagi penulis untuk menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Ilyas Supena, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Sulistio, S.Ag. M.Si., selaku Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam UIN Walisongo Semarang, selaku dosen wali studi sekaligus pembimbing II yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Hatta Abdul Malik, S.Sos.I selaku Sekretaris jurusan Pengembangan Masyarakat Islam.
5. Bapak Dr. Agus Riyadi, M,Si selaku pembimbing I yang selalu sabar dan memberikan nasehat dalam pembelajaran bagi penulis, serta memberikan motivasi, memberikan semangat serta mengarahkan dan membimbing penulis sampai menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen pengajar dan staf karyawan di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan segala ilmu dan juga bantuan kepada penulis hingga akhir studi.

7. Bapak Heri Herantoro, S.H. selaku Koordinator BKM ARTA KAWULA Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang atas ijin dan bantuan untuk penelitian.
8. Bapak H. Busyairi selaku anggota BKM ARTA KAWULA yang selaku meluangkan waktu kepada peneliti dalam rangka penggalian data dan selalu sabar mendampingi selama proses penelitian.
9. Bapak H. Ahmat Romli selaku Sekretaris BKM ARTA KAWULA yang selaku meluangkan waktu kepada peneliti dalam rangka penggalian data dan selalu sabar mendampingi selama proses penelitian.
10. Kedua orang tua, dan adik saya yang senantiasa memberikan penulis cinta dan kasih sayang, dukungan, dorongan, motivasi, semangat, nasehat serta doa yang selalu dipanjatkan setiap saat sehingga penulis dapat menyelesaikan studi strata I di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
11. Keluarga besar jurusan Pengembangan Masyarakat Islam khususnya sahabat-sahabat angkatan 2016 yang telah berjuang bersama meraih masa depan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi masih perlu penyempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan guna perbaikan dan

penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan khususnya bermanfaat bagi penulis. Penulis juga berdoa semoga kebaikan bantuan, bimbingan, dan dukungan yang telah diberikan dapat dibalas oleh Allah SWT. Aamiin

Semarang, 10 September 2020

Rachmat Darul 'Adhim

NIM: 1601046050

PERSEMBAHAN

Sebuah karya ini ku persembahkan untuk...

1. Kedua orang tua saya Bapak dan Ibu, terimakasih doamu adalah kekuatan Bagiku. Doanya menjadi obat untuk segala hambatan dan rintangan selama Proses pengerjaan skripsi ini. Selalu motivasi dan pengingat dalam menjalani hidup.
2. Adeku, terimakasih atas bantuan dan support yang kau berikan untukku

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya (Al Maidah : 2)

ABSTRAK

Nama : Rachmad Darul Adim
NIM : 1601046050
Judul Skripsi : **Peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Krobokan Semarang Barat**

Permasalahan yang dihadapi oleh negara Indonesia sebagai negara sedang berkembang salah satunya adalah masalah kemiskinan dan upaya untuk menanggulangnya. Peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk menanggulangi kemiskinan salah satunya dengan memberdayakan masyarakat. Ditingkat kelurahan oleh pemerintah dibentuk kelembagaan masyarakat yang disebut Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Dengan adanya BKM dapat dijadikan sebagai langkah awal untuk membuka lapangan usaha/kerja bagi masyarakat miskin di kelurahan krobokan dengan program yang diberikan yang akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui peran BKM ARTA KAWULA dalam pengembangan ekonomi masyarakat kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat. (2) Untuk mengetahui hasil peran BKM ARTA KAWULA di Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Lokasi penelitian di Di kelurahan Krobokan Semarang Barat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain: observasi, wawancara, dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah koordinator BKM, anggota BKM, kepala Lurah, anggota KSM, ketua KSM, Faskel dan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Peran BKM Arta Kawula dalam pengembangan ekonomi masyarakat kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang melalui program ekonomi bergulir. Adapun pembagaian peran dalam Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) melalui ekonomi bergulir dibagi menjadi 3 bagaian

yaitu peran aktif, peran partisipatif, dan peran pasif. Pemberian pinjaman modal bergulir bertujuan agar sebagian besar sebagai pedagang / wirausaha kecil yang tidak memiliki modal bisa membuka lapangan pekerjaan sendiri dan tidak lagi bergantung dengan orang lain. Peran BKM Arta Kawula dalam mengorganisasikan warga secara partisipatif membawa dampak yang positif terhadap masyarakat di kelurahan krobokan, karena masyarakat lebih mudah mengetahui pelaksanaan program ekonomi bergulir yang menjadi program untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dibidang ekonomi. (2) Hasil *Peran BKM Arta Kawula di Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang* dalam pengembangan ekonomi meliputi tiga aspek, yaitu aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek lingkungan. Pemberdayaan aspek sosial yang dikenal dengan konsep Tridaya UPS (unit pengelola sosial) di kelurahan krobokan untuk tahun ini lebih fokus kepada program peduli Corona dengan melaksanakan bantuan sosial berupa pembagaian sembako gratis. Sedangkan program pelatihan ketrampilan yang sudah direncanakan untuk tahun 2020 belum berjalan sesuai rencana atau seperti yang diharapkan. Pemberdayaan aspek ekonomi yang dikenal dengan konsep Tridaya UPK (unit pengelola keuangan) yaitu program ekonomi bergulir yang paling diunggulkan dan manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat adalah di bidang ekonomi yaitu modal pinjaman bergulir. Peran BKM Arta Kawula dalam memberikan modal pinjaman bergulir ini sangat membantu masyarakat dalam mengembangkan atau mendirikan usaha. Modal pinjaman bergulir dikhususkan pada mereka yang kekurangan modal atau tidak memiliki pendapatan. Banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya, dengan adanya modal pinjaman bergulir tersebut. Pemberdayaan aspek lingkungan yang dikenal dengan konsep Tridaya UPL (unit pengelola lingkungan) yaitu program perbaikan lingkungan dan rehab rumah warga miskin yang masih ber dinding bambu. BKM Arta kawula berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Kelurahan Krobokan Semarang Barat.

Kata Kunci: *Peran BKM, Pengembangan Ekonomi, Masyarakat*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah Penelitian	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitia.....	9
D. Tinjauan Pustaka.....	11
E. Metode Penelitian	21
F. Teknik Pengumpulan Data	24
G. Uji Keabsahan Data	25
H. Teknik Analisis Data	27

BAB II	PERAN BKM ARTA KAWULA DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT KELURAHAN KROBOKAN KECAMATAN SEMARANG BARAT	28
A.	Peran	28
	1. Pengertian Peran	28
	2. Macam – macam Peran	29
	3. Pembagian Peran.....	30
B.	Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	31
	1. Pengertian BKM	31
	2. Peran Badan Keswadayaan Masyarakat BKM....	33
	3. Landasan Hukum BKM	35
	4. Unit – unit pelaksanaan Tugas BKM.....	35
	5. Tugas dan Fungsi UPK, UPL, UPS	37
	6. Bentuk Kegiatan BKM.....	39
C.	Dasar Hukum Usaha Peningkatan Taraf Hidup	40
D.	Pengembangan Ekonomi Masyarakat.....	45
	1. Pengertian Pengembangan Ekonomi Masyarakat	45
	2. Bentuk-bentuk Pengembangan Ekonomi	48
BAB III	PERAN BKM ARTA KAWULA DI KELURAHAN KROBOKAN KECAMATAN SEMARANG BARAT ...	49
A.	Gambaran Umum BKM ARTA KAWULA	49

1.	Sejarah Berdirinya BKM ARTA KAWULA	49
2.	Struktur Organisasi BKM ARTA KAWULA	52
3.	VISI – MISI BKM ARTA KAWULA	62
B.	Gambaran Kelurahan Krobokan Semarang Barat	64
C.	Peran Badan Keswadayaan ARTA KAWULA Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat	70
1.	Peran BKM ARTA KAWULA Dalam Menumbuhkan Ekonomi Masyarakat	70
2.	Peran BKM ARTA KAWULA Dalam Mengelola Konflik Antar Anggota	72
3.	Peran BKM ARTA KAWULA Dalam Menjalini Kerja Sama dan Saling Memotivasi.....	74
4.	Peran BKM ARTA KAWULA Dalam Pengembangan Masyarakat Melalui Program Ekonomi Bergulir	75
D.	Hasil Peran Badan Keswadayaan ARTA KAWULA Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat	79
1.	Aspek Sosial.....	79
2.	Aspek Ekonomi.....	83
3.	Aspek Lingkungan.....	87
BAB IV	ANALISA PERAN BKM ARTA KAWULA DI KELURAHAN KROBOKAN KECAMATAN SEMARANG BARAT	92

A.	Analisis Peran BKM ARTA KAWULA di	
	Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat	92
	1. Peran Aktif	93
	2. Peran Partisipatif.....	94
	3. Peran Pasif	94
B.	Analisis Hasil Peran BKM ARTA KAWULA di	
	Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat	95
	1. Aspek Sosial.....	96
	2. Aspek Ekonomi.....	97
	3. Aspek Lingkungan.....	99
BAB V	PENUTUP	104
	A. Kesimpulan.....	104
	B. Saran-Saran	106
	C. Penutup	107

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Jenis Kelamin	67
Tabel 3.2 Jumlah Lembaga pendidikan	68
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian	69
Tabel 4.1 Perbandingan Tindakan Sebelum dan sesudah adanya BKM	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Kelurahan Krobokan	65
Gambar 3.2 Bantuan Sembako untuk Masyarakat Kelurahan Krobokan	82
Gambar 3.3 Kerajinan Topeng	86
Gambar 3.4 Papan Informasi Proyek Pembuatan Selokan Kelurahan Krobokan	89
Gambar 3.5 Pembuatan Saluran Selokan Kelurahan Krobokan	90
Gambar 3.6 Gambar Perbaikan Rumah Keluarga Miskin	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks yang bersifat multidimensional, tidak hanya bersifat individual yang melihat kemiskinan sebatas ketidak mampuan seseorang atau keluarga dalam memenuhi kemampuan hidupnya atau kesejahteraan keluarganya. Akan tetapi terkait berbagai faktor politik, sosial, ekonomi, aset, dan lain-lain. Hal tersebut perlu penanganan yang serius dalam pemecahannya. Kemiskinan juga merupakan isu penting dalam pembangunan di negara-negara berkembang termasuk di Indonesia. Selama ini, strategi pembangunan digalakkan untuk mengentaskan kemiskinan tersebut. Pada awalnya pembangunan cenderung diarahkan dari atas ke bawah (*top – down*), dimana pertumbuhan akan mengalir dari lapisan atas ke lapisan bawah.¹

Pembangunan *top down*, masyarakat cenderung tidak pernah dilibatkan secara langsung, baik dalam perencanaan maupun sampai evaluasi. Masyarakat hanya dijadikan sebagai

¹ Direktorat Jendral Perumahan dan Permukiman
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah. 2002 b. *Pedoman Umum P2KP-2*. Jakarta : P2KP. Hlm.1

objek pembangunan, akan tetapi tidak diberikan kesempatan untuk memberdayakan dirinya sendiri, dalam hal ini untuk membuat dirinya mandiri. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan hanya dikaitkan dengan sarana-prasarana saja, tanpa ada keinginan untuk membangun manusianya. Jika pembangunan sarana-prasarana tersebut telah selesai tetapi masyarakat tidak bisa mengembangkannya, maka masyarakat akan bergantung pada pihak lain untuk mengembangkan kembali sarana-prasarana tersebut. Oleh karena itu pembangunan tidak lagi di gerakkan untuk pertumbuhan ekonomi semata, namun lebih cenderung kepada pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*). Yang berasumsi bahwa ketika masyarakat berdaya sebagai subyek pembangunan, maka pada akhirnya mereka akan berdaya secara ekonomi yakni dengan cara pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) sehingga masyarakat tidak akan bergantung pada pihak manapun.²

Pembangunan kesejahteraan sosial di era otonomi daerah saat ini mempengaruhi peran pemerintah pusat dalam menentukan pembangunan kesejahteraan sosial di daerah. Peran pemerintah saat ini semakin berkurang, karena pemerintah hanya berfungsi

² Kementerian Pekerjaan Umum. Petunjuk Teknis Pelaksana BKM. Jakarta: Direktorat Jenderal 2002. hlm. 5

sebagai fasilitator. Peran yang lebih besar dipegang oleh daerah. Daerah mempunyai hak sepenuhnya untuk menentukan bidang pembangunan kesejahteraan sosial sesuai dengan prioritas masalah, kondisi, dan situasi yang dihadapi masyarakatnya. Dengan demikian maka peran serta masyarakat di daerah menjadi lebih besar, karena mereka sebagai pemilik dan penentu pembangunan itu sendiri. Untuk itu masyarakat dituntut untuk terlibat sepenuhnya dalam seluruh proses kegiatan pembangunan. Proses pembangunan merupakan suatu siklus yang berkelanjutan, sehingga keterlibatan masyarakat tidak hanya dalam satu tahapan pembangunan, tetapi dalam seluruh proses, termasuk didalamnya monitoring, dan evaluasi yang dilakukan secara partisipatori. Pembangunan kesejahteraan sosial yang disarankan kepada pembangunan manusia, mensyaratkan dalam pelaksanaannya melibatkan langsung masyarakat yang dikenai pembangunan. Oleh karena itu masyarakat tidak lagi dipandang sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subyek pembangunan, mereka mempunyai hak menentukan pembangunan yang cocok dan dapat diterima dalam kehidupan mereka.

Kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan dengan adanya sumber daya manusia yang sanggup mengelola potensi dan sumber yang ada di sekitarnya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Dalam proses pemberdayaan, masyarakat dituntut

untuk berperan aktif dalam proses pembangunan, dari mulai tahap perencanaan, sampai tahap pengawasan. Karena tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri.³

Coyners³ mengatakan ada tiga alasan tentang pentingnya partisipasi masyarakat, yaitu :

1. Merupakan suatu alat untuk memperoleh informasi mengenai kondisi kebutuhan dan sikap masyarakat setempat. Tanpa informasi tersebut maka pembangunan akan gagal.
2. Masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan, apabila mereka dilibatkan dalam proses proyek / pembangunan tersebut akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut.
3. Adanya anggapan bahwa suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat itu sendiri, dimana masyarakat memiliki hak untuk menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan diwilayahnya.

Salah satu implementasi pembangunan berkelanjutan seperti yang telah dijelaskan diatas adalah dengan adanya program penanggulangan kemiskinan perkotaan P2KP atau yang menjadi cikal bakal lahirnya PNPM mandiri perkotaan atau yang sekarang

³Tim Pengembangan Masyarakat, 2005. Hlm 40.

menjadi program KOTAKU (Kota tanpa Kumuh) sesuai dengan peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 tentang pengentasan kemiskinan dan pemukiman kumuh perkotaan.⁴ Didalam program KOTAKU terdapat wadah yang mampu memandirikan masyarakat dalam segi ekonomi, yaitu Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) adalah satu program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sistem pembangunan *bottom up*, yakni program yang melibatkan masyarakat sebagai subyek dalam proses pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan juga tahap evaluasi pembangunan. Program tersebut memiliki tujuan untuk mencapai masyarakat berdaya. Akan tetapi dalam menuju proses tersebut tentunya tidak akan mudah, oleh karenanya diperlukan sebuah proses / tahapan dan waktu yang panjang untuk mewujudkan tujuan tersebut. BKM ini merupakan suatu kelembagaan yang dirancang untuk dapat menjadi penggerak pembangunan masyarakat mandiri yang mampu mengatasi kemiskinannya. Misi dari lembaga ini adalah menumbuhkan kembali ikatan sosial antar warga masyarakat untuk bekerja sama dalam kebaikan bersama

⁴ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Petunjuk Pelaksanaan KOTAKU, 2016. Hlm 2.

serta berupaya menumbuhkan partisipasi masyarakat dengan tujuan memberdayakan rakyat untuk berperan dalam pembangunan mereka sendiri secara lebih berarti. Diantara aspek yang dikelola oleh BKM yaitu: a) Aspek Lingkungan, b) Aspek Ekonomi, c) Aspek Sosial

Idealnya setelah adanya bantuan dari pemerintah berupa program KOTAKU melalui BKM, maka masyarakat mendapatkan kehidupan yang layak, seperti diantaranya:

1. Mendapatkan sarana dan prasarana umum yang memadahi, seperti akses jalan baik, tempat ibadah dan tempat umum.
2. Mendapatkan bantuan ekonomi berupa pinjaman modal untuk mengembangkan perekonomian masyarakat.
3. Masyarakat ikut berperan aktif dalam kegiatan program KOTAKU melalui BKM.

Berdasarkan hasil observasi awal di kelurahan Krobokan kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, terdiri dari 13 RW dan 91 RT, mata pencarian masyarakat sebagian besar sebagai pedagang / wirausaha kecil, karena sebagian besar pedagang kecil yang tidak memiliki modal untuk membuka usaha. Kurangnya modal dan pendapatan, menyebabkan sebagian masyarakat berani meminjam uang kepada Bank keliling yang oleh masyarakat disebut rentenir, untuk mengembangkan usahanya. Selain itu masih ada rumah-rumah warga yang tidak layak huni. Oleh karena

itu Direktorat Jendral Perumahan dan permukiman melalui Departemen Permukiman dan prasarana Wilayah dengan P2KP atau yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) membentuk Lembaga Swadaya Masyarakat yang disebut BKM yang bertujuan untuk menumbuhkan kemandirian ekonomi masyarakat. Dan dengan adanya BKM tersebut, masyarakat menjadi lebih terbantu dengan adanya ekonomi bergulir yang menjadi program untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dibidang ekonomi. Program ekonomi bergulir ini ditujukan kepada masyarakat kelurahan Krobokan untuk membuka usaha atau pun meminjam modal. Dengan adanya BKM dapat dijadikan sebagai langkah untuk mengangkat perkembangan ekonomi masyarakat kelurahan Krobokan melalaui pemberian kredit usaha rakyat dalam kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Pemberian kredit tersebut sifatnya pinjaman dan bergulir, dengan cara masyarakat miskin diberi pinjaman untuk dikelola bersama kelompok masyarakat yang sudah dibentuk.

Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan pada peran masyarakat dalam mengikuti kegiatan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh program BKM. Peran BKM sebagai motor penggerak dalam melembagakan dan membudayakan kembali nilai-nilai kemanusiaan dan masyarakat sebagai nilai-nilai utama yang melandasi aktivitas penanggulangan kemiskinan oleh

masyarakat sendiri dikelurahan mereka, sehingga tidak ada lagi kelompok masyarakat yang masih terjebak dalam lingkaran kemiskinan.

Bahwa kemiskinan adalah keadaan yang senantiasa menjadi masalah dalam kehidupan sosial masyarakat.

Dengan kemiskinan biasanya terdampak adanya : tindakan kejahatan, pencurian, kurangnya peduli tentang pendidikan, kurangnya hidup sehat dan bisa terjadi timbulnya kekufuran , seperti Sabda Nabi Muhammad SAW “

كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا

Artinya “ Keadaan *Fakir* dekat dengan kekufuran “.

Pemberdayaan ekonomi ini merupakan program simpan pinjam untuk masyarakat di kelurahan Krobokan Semarang Barat Kota Semarang diutamakan adalah sebagai pedagang / wirausaha kecil, karena sebagian besar pedagang kecil yang tidak memiliki modal membuka usaha mandiri atau mengembangkan usaha. Berdasarkan latar belakang masalah diatas peneliti tertarik untuk menyusun Skripsi dengan judul “***Peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) ARTA KAWULA dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang*** “.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun permasalahan yang akandikaji dalam penelitian ini, adalah :

1. Bagaimana peran BKM ARTA KAWULA dalam pengembangan ekonomi masyarakat kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat ?
2. Bagaimana hasil peran BKM ARTA KAWULA di Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran BKM ARTA KAWULA dalam pengembangan ekonomi masyarakat kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat.
2. Untuk mengetahui hasil peran BKM ARTA KAWULA di Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat.

Mengacu pada tujuan penelitian, maka kegunaan dilaksanakannya penelitian ini terbagi menjadi manfaat praktis dan manfaat teoritis. Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan pengetahuan bagaimana cara menumbuh kembangkan kemandirian masyarakat dalam pembangunan fisik, serta dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat selama kuliah pada permasalahan dan kondisi masyarakat, sehingga mendapat suatu pengalaman antara teori dan kenyataan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada di Kelurahan Krobokan.

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan serta sebagai bahan penunjang untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitaian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan tentang bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi, serta dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama kuliah pada permasalahan dan kondisi masyarakat.

b. Bagi Masyarakat

1) Hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan tentang program-program BKM, salah satunya cara pengembangan ekonomi masyarakat

2) Hasil penelitian ini secara khusus penelitian ini diharapkan mampu memperlihatkan terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat dibidang ekonomi.

c. Bagi BKM

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi BKM untuk mengetahui kekurangan dan ketidak sesuaian program yang telah dilaksanakan, selain itu BKM juga dapat meningkatkan pelayanannya terhadap keluhan serta kebutuhan masyarakat.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini, peneliti mengacu kepada referensi terhadap penelitian – penelitian sebelumnya. Selain sebagai acuan, tinjauan pustaka ini juga untuk menghindari kesamaan terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun penelitian-penelitian sebelumnya yaitu :

1. Diah Putriana Arifani 2009 yang meneliti tentang *Peranan BKM dalam Menumbuhkan Kemandirian Masyarakat dibidang Pembangunan Fisik melalui P2KP de Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.*⁵ Tujuan penelitian ini

⁵ Diah Putriana Afriani, Peranan BKM dalam Menumbuhkan Kemandirian Masyarakat Dibidang Pembangunan

adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembangunan di Desa Sriwulan dalam bentuk peranan dan upaya BKM dalam meningkatkan partisipasi masyarakat serta hambatan dalam pelaksanaan pembangunan fisik. Yang menjadi fokus penelitian ini adalah peranan BKM dalam menumbuhkan kemandirian masyarakat Desa Sriwulan Khususnya di bidang pembangunan fisik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang memaparkan berbagai data yang diperoleh dari hasil pengamatan maupun wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran BKM sebagai fasilitator dalam P2KP khususnya bidang pembangunan fisik untuk dapat membentuk masyarakat mandiri sangatlah membantu, hal tersebut dapat dilihat dari peranaktif masyarakat Desa Sriwulan dalam pelaksanaan pembangunan fisik mulai dari identifikasi masalah, skala prioritas, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, monitoring, evaluasi hasil sampai dengan pemanfaatan dan pemeliharaan hasil pembangunan. Selain itu, partisipasi masyarakat Desa Sriwulan diwujudkan dalam swadaya, tenaga, ide/ gagasan ataupun jiwa sosial lainnya. Sehingga masyarakat akan

memperoleh hasil pembangunan yang maksimal karena pembangunan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan masyarakat akan memiliki rasa handarbeni yang sangat tinggi maka apabila terjadi kerusakan, masyarakat akan segera memperbaiki sendiri tanpa harus menunggu perintah dari pemerintah. Sedangkan upaya BKM dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat dengan menyediakan dana stimulus bagi warga yang mau berpartisipasi serta memberikan *reward* bagi KSM berprestasi. Perbedaan penelitian ini dengan peneliti sebelumnya terletak pada lokasi penelitian di Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, peran BKM pada perkembangan ekonomi masyarakat kelurahan Krobokan melalui pemberian kredit usaha rakyat dalam kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Pemberian kredit tersebut sifatnya pinjaman dan bergulir, dengan cara masyarakat miskin diberi pinjaman untuk dikelola bersama kelompok masyarakat yang sudah dibentuk. Persamaan dengan peneliti terdahulu yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif

2. Andi Evi Desiana Ishak 2018 yang meneliti tentang *Peran BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) Dalam penanggulangan Kemiskinan berbasis kemandirian di kelurahan Pandang-Pandang Jl. Sultan Hasanuddin Kecamatan Somba Opu*

Kabupaten Gowa.⁶ Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui model penanggulangan kemiskinan berbasis kemandirian di Kelurahan Pandang-Pandang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (2) Untuk mengetahui Peran BKM dalam penanggulangan kemiskinan Berbasis Kemandirian Di kelurahan Pandang-Pandang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Lokasi penelitian di Di kelurahan Pandang-Pandang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain: observasi, wawancara, dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah koordinator BKM, anggota BKM, kepala Lurah, KSM (UPK) dan masyarakat miskin. Analisis data yang dilakukan menggunakan analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Model penanggulangan kemiskinan berbasis kemandirian melalui pemberdayaan. Pemberdayaan di sini ialah meningkatkan skill masyarakat miskin dengan memberikan pelatihan-pelatihan. Diantaranya yaitu pelatihan menjahit dan pengembangan kapasitas masyarakat.. Serta

⁶ Andi, Peran BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) Dalam penanggulangan Kemiskinan berbasis kemandirian di kelurahan Pandang-Pandang Jl. Sultan Hasanuddin Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Skripsi UIN Alauddin makasar 2018

memberikan modal pinjaman bergulir bagi masyarakat ekonomi lemah. (2) Peran BKM dalam menanggulangi kemiskinan di kelurahan Pandang-Pandang meliputi tiga bidang (Tridaya) yaitu bidang lingkungan, bidang sosial, dan bidang ekonomi. BKM, menanggulangi kemiskinan tidak hanya dengan pendekatan ekonomis tetapi juga dengan pendekatan karakter. Pemerintah kelurahan Pandang-Pandang, menekankan klasifikasi penggolongan masyarakat miskin, guna meminimalkan jumlah penduduk miskin yang ada di kelurahan Pandang-Pandang. Masyarakat miskin, meningkatkan kesadaran untuk membangun dirinya dan bisa memanfaatkan model penanggulangan kemiskinan yang diberikan pemerintah Kelurahan maupun BKM dan akhirnya masyarakat di kelurahan pandang-pandang Mandiri tidak bergantung lagi dengan orang lain. Perbedaan penelitian ini dengan peneliti sebelumnya terletak pada lokasi penelitian di Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, peran BKM pada perkembangan ekonomi masyarakat kelurahan Krobokan melalui pemberian kredit usaha rakyat dalam kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Pemberian kredit tersebut sifatnya pinjaman dan bergulir, dengan cara masyarakat miskin diberi pinjaman untuk dikelola

bersama kelompok masyarakat yang sudah dibentuk, dan penelitian ini menggunakan metode kualitatif

3. Vrisca Ariestiya (2015) yang meneliti tentang *Peran Badan Keswadayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Kemiskinan DiKelurahan Jambangan Kota Surabaya*.⁷ Tujuan penelitian mendeskripsikan Peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam penanggulangan kemiskinan di kelurahan jambangan surabaya dan mendeskripsikan kendala atau hambatan bagi Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Amanah dalam penanggulangan kemiskinan di kelurahan jambangan kota surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pengorganisasian warga secara partisipatif yang dilakukan BKM membawa dampak positif terhadap masyarakat, (2) sebagai dewan pengambilan keputusan dalam penanggulangan kemiskinan BKM melakukan secara kolektif dengan jalan musyawarah, (3) keputusan yang diambil BKM selalu mengedepankan nilai-nilai luhur yaitu kejujuran, keadilan, transparan, dan

⁷ Vrisca Ariestiy, Peran Badan Keswadayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Kemiskinan DiKelurahan Jambangan Kota Surabaya. Skripsi UNESA 2015

demokratis, (4) kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin dengan cara melakukan pelatihan-pelatihan, (5) dalam mengembangkan jaringan, BKM bekerjasama dengan masyarakat, aparatur kelurahan dan dengan pemerintah daerah/kota, (6) dalam menetapkan kebijakan dan pemanfaatan dana BLM yang dilakukan BKM dengan mengalokasikan dana tersebut kedalam tiga bidang pembangunan yaitu lingkungan, sosial dan ekonomi. Kesimpulannya adalah semua peran yang dilakukan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) tidak lepas sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan. Dari pengorganisasian, proses pengambilan keputusan, nilai-nilai yang ditanamkan, pemberdayaan masyarakat, pengembangan jaringan dan pemanfaatan dana BLM sebagai upaya yang diinginkan masyarakat melalui program-program BKM. Perbedaan penelitian ini dengan peneliti sebelumnya terletak pada lokasi penelitian di Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, peran BKM pada perkembangan ekonomi masyarakat kelurahan Krobokan melalui pemberian kredit usaha rakyat dalam kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Pemberian kredit tersebut sifatnya pinjaman dan bergulir, dengan cara masyarakat miskin diberi pinjaman untuk dikelola bersama kelompok masyarakat yang sudah dibentuk.

Persamaan dengan penelitian peneliti terdahulu yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif

4. Nur Achla Chalia (2015) yang meneliti tentang *Peranan BKM dalam penanggulanagn kemiskinan berbasis kemandirian di desa pecangaan Kabupaten Jepara*,⁸ dari Universitas Negeri Semarang jurusan Politik dan Kewarganegaraan tahun 2015. Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) mengetahui model penanggulangan kemiskinan berbasis kemandirian di Desa Pecangaan Wetan Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara; (2) mengetahui peran BKM dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Pecangaan Wetan Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Model penanggulangan kemiskinan berbasis kemandirian melalui pemberdayaan. Pemberdayaan di sini meningkatkan *skill* masyarakat miskin dengan memberikan pelatihan-pelatihan. Diantaranya yaitu pelatihan komputer, menjahit, jamur merang, dll. Serta memberikan modal pinjaman bergulir bagi masyarakat ekonomi lemah. (2) Peran BKM dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Pecangaan Wetan meliputi

⁸ Nur Achla Chalia, *Peranan BKM dalam penanggulanagn kemiskinan berbasis kemandirian di desa pecangaan Kabupaten Jepara*. Skripsi Universitas Negeri Semarang jurusan Politik dan Kewarganegaraan 2015

tiga bidang (Tridaya) yaitu bidang lingkungan, bidang sosial, dan bidang ekonomi. Bidang lingkungan seperti pembuatan saluran air, betonisasi, pavingisasi dll. Bidang sosial meliputi rehab rumah, bantuan jamban keluarga (WC). Bidang ekonomi yaitu modal pinjaman bergulir. Yang paling diunggulkan dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat miskin yaitu modal pinjaman bergulir khususnya pada masyarakat ekonomi lemah. BKM di sini sangat berperandalam menanggulangi kemiskinan di Desa Pecangaan Wetan. Perbedaan penelitian ini dengan peneliti sebelumnya terletak pada lokasi penelitian di Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, peran BKM pada perkembangan ekonomi masyarakat kelurahan Krobokan melalui pemberian kredit usaha rakyat dalam kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Pemberian kredit tersebut sifatnya pinjaman dan bergulir, dengan cara masyarakat miskin diberi pinjaman untuk dikelola bersama kelompok masyarakat yang sudah dibentuk. Persamaan dengan peneliti terdahulu pada metode penelitian kualitatif

5. Zidni Maghfirotul Anam (2015) yang meneliti tentang *Audit Manajemen atas program penanggulangan kemiskinan (PRONANGKIS) di Badan Keswadayaan Masyarakat Kedung Jaya Desa Kedungpuji Kecamatan Gombang Kabupaten*

*Kebumen.*⁹ Tujuan penelitian untuk mengetahui hasil analisis tentang efektivitas audit manajemen atas program penanggulangan kemiskinan di BKM Kedung Jaya Desa Kedungpuji, Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa adalah (1) Program Penanggulangan Kemiskinan (Pronangkis) yang ada di BKM Kedung Jaya terdiri dari komponen lingkungan, komponen sosial, dan komponen ekonomi, (2) pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan BKM Kedung Jaya secara umum sudah berjalan cukup efektif dan sesuai dengan tujuan yaitu menanggulangi kemiskinan yang ada di Desa Kedungpuji (3) pelaksana Program Penanggulangan Kemiskinan terdiri dari tim pengelola yang ditunjuk oleh BKM untuk terjun langsung ke lapangan sebaik mungkin agar semua program yang direncanakan dapat dilaksanakan, (3) dalam meningkatkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan, organisasi seharusnya mempersiapkan alternatif. Perbedaan penelitian ini dengan peneliti sebelumnya terletak pada lokasi penelitian di

⁹ Zidni Maghfirotul Anam, Analisis Tentang Efektivitas Audit Manajemen Atas Program Penanggulangan Kemiskinan di BKM Kedung Jaya Desa Kedungpuji, Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen. 2015

Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, peran BKM pada perkembangan ekonomi masyarakat kelurahan Krobokan melalui pemberian kredit usaha rakyat dalam kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Pemberian kredit tersebut sifatnya pinjaman dan bergulir, dengan cara masyarakat miskin diberi pinjaman untuk dikelola bersama kelompok masyarakat yang sudah dibentuk, dan menggunakan metode penelitian kualitatif.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹⁰ Objek penelitian kualitatif, adalah objek yang alamiah atau *natural setting*. Obyek yang alamiah adalah obyek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki obyek relatif tidak berubah.¹¹

¹⁰ Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja RosdaKarya. 2013.hlm 4.

¹¹ Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta. 2013. hlm 2.

2. Sumber dan Jenis Data

Data merupakan keterangan-keterangan suatu hal yang dapat berupa sesuatu yang diketahui atau sesuatu yang dapat digambarkan melalui angka, simbol, kode, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian. Data perlu dikelompokkan terlebih dahulu sebelum dipakai dalam proses analisis. Pengelompokan data disesuaikan dengan karakteristik yang menyertainya. Sumber data penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber dari hasil wawancara dengan informan. Informan yaitu orang dimanfaatkan untuk memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, antara lain : 1) Pengurus BKM, 2) KSM yang telah dibentuk, 3) Masyarakat setempat terdiri dari tokoh masyarakat, Tokoh agama, tokoh pemuda, dan warga sipil

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, SMS, dan lain-lain), foto-foto, film, rekaman video,

benda-benda lain-lain yang dapat memperkaya data primer.¹²

Sumber Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung, dari sumbernya yaitu buku-buku literatur, majalah, surat kabar, makalah-makalah penelitian, arsip atau dokumen dan sumber lain yang relevan untuk dijadikan pelengkap informasi dalam penelitian. Dilihat dari segi sumber data, sumber tertulis dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.¹³

Untuk memperoleh sumber data sekunder peneliti menggunakan teknik dokumentasi. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber tertulis yang berupa buku, arsip, dokumen resmi, program-program kegiatan dan foto kegiatan yang dilakukan oleh BKM. Hal ini dapat dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data melalui informan atau responden.

¹²Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2010. hlm 22.

¹³Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya. 2010. hlm 159

F. Teknik Pengumpulan Data.

Untuk Mencapai hasil yang maksimal, peneliti berusaha menyajikan teknik pengumpulan data yang sekiranya dapat mengantarkan data yang benar-benar valid dan mendukung. Dalam hal ini peneliti memakai teknik prngumpulan data sebagai tersebut :

a. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melihat secara langsung kinerja BKM Arta Kawula serta keaktifan Masyarakat Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang dalam mengikuti program BKM Arta Kawula.

b. Metode wawancara

Wawancara yang dipakai adalah wawancara semi terstruktur yang dipakai adalah pertanyaan terbuka kepada Koordinator BKM dan pejabat Kelurahan mengenai mekanisme dan struktural BKM. Selain itu, wawancara juga dilakukan pada warga setempat untuk mengetahui dan memahami penyelenggaraan serta ragam kegiatannya. Dalam penggunaan teknik wawancara sebagai teknik pengumpul data, data yang diperoleh peneliti dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan, dan bertatap muka langsung.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen – dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain oleh subjek. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan penelitian Kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. Dengan metode ini, penelitian mengumpulkan data dari dokumen yang sudah ada, sehingga penulis dapat memperoleh catatan-catatan yang berubungan dengan penelitian. Metode dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang belum didapatkan melalui metode wawancara dan observasi.

G. Uji Keabsahan Data

Penelitian kualitatif perlu adanya teknik pemeriksaan untuk menetapkan keabsahan data. Untuk mendapatkan keabsahan data, diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas kriteria tertentu.¹⁴ Ada empat kriteria yang digunakan yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan

¹⁴ Ibid, hlm 324

(*transferability*), ketergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*).

Adapun teknik yang digunakan oleh penulis untuk menguji objektivitas dan keabsahan data dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi oleh,¹⁵ adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi yang dilakukan dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu Triangulasi dengan memanfaatkan sumber, berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Triangulasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.

Selain triangulasi sumber, peneliti juga menggunakan triangulasi dengan metode, terdapat dua strategi yaitu: pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. Dengan cara membandingkan data hasil pengamatan, hasil wawancara juga dokumentasi yang peneliti peroleh dari hasil penelitian.

¹⁵ Ibid, hlm 330-331

H. Teknik Analisis Data

Moleong¹⁶ mendefinisikan analisis data sebagai suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, katagori, dan satuan uraian dasar. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan data kualitatif model interaktif, yang meliputi tahap reduksi data, sajian data, penarikan simpulan, dan verifikasi penelitian. Keempat komponen analisis tersebut (reduksi, sajian, penarikan simpulan/verifikasi data) dilakukan secara simultan sejak proses pengumpulan data dilakukan.

¹⁶ Ibid, hlm 248

BAB II

**PERAN BKM ARTA KAWULA DALAM PENGEMBANGAN
EKONOMI MASYARAKAT KELURAHAN KROBOKAN
KECAMATAN SEMARANG BARAT**

A. Peran

1. Pengertian Peran

Teori peran (*role theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikolog, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Dalam ketiga bidang ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bercermin sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu diharapkan untuk berperilaku secara tertentu¹⁷

Soekanto,¹⁸ mengungkapkan bahwa peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka menjalankan suatu peranan. Sedangkan

¹⁷ Sarwono, Sarlito W. Psikologi Remaja. Jakarta: Rajawali Pers. 2013. hlm 215.

¹⁸ Soekanto. Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. 2007. hlm 224.

menurut Biddle dan Thomas dalam Sarwono,¹⁹ menyatakan bahwa peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu.

2. Macam-macam peran

Menurut Soekanto²⁰ peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat-syarat peran mencakup 3 (tiga) hal, yaitu :

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai

¹⁹ Sarwono, Sarlito W. Psikologi Remaja. Jakarta: Rajawali Pers. 2013

²⁰ Ibid, hlm 213

perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

- c. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk melakukan kegiatan – kegiatan.

3. Pembagaian Peran

Adapun pembagaian peran dibagi menjadi 3 yaitu:

- a. Peran aktif

Peran aktif adalah peran yang diberikan kepada anggota atau kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat dan lain sebagainya.

- b. Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan kepada anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

- c. Peran pasif

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

B. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)

1. Pengertian BKM

BKM adalah singkatan dari Badan Keswadayaan Masyarakat, yang merupakan nama “*jenerik*” atau istilah untuk lembaga masyarakat dengan kedudukan sebagai pimpinan kolektif dari himpunan masyarakat di tingkat Desa/ Kelurahan. BKM merupakan suatu lembaga masyarakat yang berbentuk paguyuban, dengan kedudukan sebagai pimpinan kolektif desa / kelurahan, yang bertanggung jawab menjamin keterlibatan semua lapisan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan secara partisipatif yang kondusif. BKM secara khusus ditujukan untuk penanggulangan kemiskinan dan untuk membangun masyarakat kelurahan pada umumnya. BKM juga menjadi sumber energi dan inspirasi untuk membangun prakarsa dan kemandirian warga yang secara damai, berupaya untuk memenuhi atau kepentingan warga dengan bersama-sama, dan menyatakan kepedulian bersama yang berkaitan dengan kemiskinan.²

Menurut Soetomo ²¹ BKM sebagai “institusi lokal yang dibentuk melalui program PNPM didesain sebagai institusi

²¹ Soetomo, Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010. hlm 28.

sukarela”. BKM pada prinsipnya adalah wadah sinergis masyarakat bagi orang-orang yang peduli terhadap permasalahan kemiskinan dikomunitasnya.” BKM adalah lembaga masyarakat (*Civil Society Organization*), yang pada hakikatnya mengandung pengertian sebagai wadah masyarakat untuk bersinergi dan menjadi lembaga kepercayaan milik masyarakat, yang diakui baik oleh masyarakat sendiri maupun pihak luar, dalam upaya masyarakat membangun kemandirian menuju tatanan masyarakat madani (*civil society*), yang dibangun dan dikelola berlandaskan berbasis nilai-nilai universal (*value based*) (Tata cara Pembentukan Unit Pengelola (UP)).

BKM dibentuk sebagai lembaga pimpinan kolektif sebagai motor penggerak penumbuhan kembali *capital social* seperti solidaritas, kesatuan, gotong royong dan sebagainya. Dalam upaya menanggulangi kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan dalam menjalankan peran tersebut, BKM mengorganisasikan warga untuk merumuskan program jangka menengah tiga tahun dan rencana tahunan penanggulangan kemiskinan.²² BKM/LKM adalah lembaga pimpinan kolektif

²² Wijayati, dkk. Upaya Badan keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 10, Hal. 38

sebagai penggerak modal sosial untuk menanggulangi kemiskinan di wilayah desa/kelurahan dengan tugas pokok sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan serta aturan demokratis mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penanggulangan kemiskinan.
- b. Mengorganisasi masyarakat untuk merumuskan visi, misi, rencana strategis dan pronangkis.
- c. Memonitor, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan keputusan-keputusan yang diambil.
- d. Memverifikasi penilaian yang telah dilaksanakan oleh UP UP.
- e. Mengawasi terlembaganya nilai nilai kemanusiaan dan prinsip kemasyarakatan.
- f. Mewakili masyarakat untuk memberikan kontrol dan masukan terhadap kebijakan pemerintah.
- g. Membangun kerjasama dengan pihak luar (Departemen Pekerjaan Umum).

2. Peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)

BKM bertanggung jawab menjamin keterlibatan semua lapisan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang kondusif untuk pengembangan keswadayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan khususnya dan

pembangunan masyarakat kelurahan pada umumnya. Peran utama Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Dalam Penanggulangan Kemiskinan²³ adalah sebagai berikut:

- a. Mengorganisasikan warga secara partisipatif untuk merumuskan rencana jangka menengah (3tahun) penanggulangan kemiskinan (PJM Pronangkis) dan diajukan ke PJOK untuk mencairkan dana Bantuan Langsung Masyarakat.
- b. Sebagai dewan pengambilan keputusan untuk hal-hal yang menyangkut pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan pada khususnya dan penanggulangan kemiskinan pada umumnya ditingkat komunitas.
- c. Mempromosikan dan menegakkan nilai-nilai luhur (jujur, adil, transparan, demokratis, dsb) dalam setiap keputusan yang diambil dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.
- d. Menumbuhkan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin agar mampu meningkatkan kesejahteraan mereka.

²³ Kementerian Pekerjaan Umum. Buku pedoman PNPM-MP. Jakarta: Direktorat Jenderal 2010

- e. Mengembangkan jaringan BKM di tingkat kecamatan kota/kabupaten sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah dan wahana untuk menyuarakan aspirasi masyarakat warga yang diwakilinya.
- f. Menetapkan kebijakan dan mengawasi proses pemanfaatan dana Bantuan Langsung masyarakat.

3. Landasan Hukum BKM

Mengenai status hukum BKM yang menurut UU perbankan 10 / 98, lembaga keuangan mikro yang didalamnya termasuk BKM adalah Keputusan bersama Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 51.1/KMK.010/2009 Nomor: 900-639A Tahun 2009 Nomor : 01/SKB/M.KUKM/IX/2009, Nomor : 11/43A/KEP.GBI/2009 Tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro dijelaskan mengenai jenis LKM, bahwa dalam UU perbankan BKM diakui sebagai BPR yang nantinya dapat menjadi bentuk koperasi, Perusahaan daerah, dan bentuk lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

4. Unit-unit pelaksanaan Tugas BKM

Unit-unit pengelola ini diangkat dan diberhentikan oleh BKM melalui mekanisme rapat anggota BKM. Dalam menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitasnya, tiap

tahun unit-unit pengelola wajib mempertanggung-jawabkan semua kerja mereka kepada BKM di dalam rapat anggota tahunan BKM. Unit-unit Pengelola BKM²⁴ antara lain:

a. Unit Pengelola Keuangan (UPK)

Unit Pengelola Keuangan adalah salah satu gugus tugas yang dibentuk oleh BKM sebagai unit mandiri untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh BKM mengenai pengelolaan dana pinjaman bergulir dan administrasi keuangannya, baik yang berasal dari dana stimulan BLM, P2KP, maupun dari pihak-pihak lainnya yang bersifat hibah.

b. Unit Pengelola Lingkungan (UPL)

Unit Pengelola Lingkungan adalah salah satu gugus tugas yang dibentuk oleh BKM sebagai unit mandiri untuk mengelola kegiatan dibidang pembangunan lingkungan perumahan dan pemukiman di wilayahnya. UPL bertanggung jawab dalam hal penanganan rencana perbaikan kampung, penataan dan pemeliharaan prasarana dasar lingkungan perumahan dan pemukiman, tata kelola yang baik (*good governance*) dibidang pemukiman, dan lain-lain.

²⁴ Ibid, hlm 23

c. Unit Pengelola Sosial (UPS).

Unit Pengelola Sosial adalah salah satu gugus yang dibentuk oleh BKM sebagai unit mandiri untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh BKM mengenai kegiatan-kegiatan dibidang sosial. Peran UPS adalah mengimplementasikan tugas BKM dalam peningkatan peran sosial bagi masyarakat miskin, menggalang kepedulian, kerelawanan dan solidaritas sosial serta melembagakan nuansa pembelajaran melalui Komunitas Belajar Kelurahan/ Desa (KBK/D).

5. Tugas dan Fungsi UPK, UPL dan UPS

Secara umum tugas dan fungsi unit-unit pengelola BKM adalah menjalankan kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh BKM, sehingga potensi unit-unit pengelola adalah sebagai pelaksana operasional yang berkaitan dengan masing-masing tugasnya sesuai apa yang tertuang dalam PJM Projangkis. Menurut Pedoman Teknis Tinjauan Partisipatif PNPM Perkotaan²⁵, secara rinci tugas masing-masing unit pengelola dijabarkan sebagai berikut :

²⁵ Ibid, hlm 21

1) Unit Pengelola Keuangan (UPK)

UPK berfungsi sebagai pengelola kegiatan penanggulangan kemiskinan bidang ekonomi dengan tugas-tugas sebagai berikut :

- a) Melakukan pendampingan penyusunan usulan kegiatan KSM;
- b) Mengendalikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KSM ekonomi
- c) Melakukan pengelolaan keuangan pinjaman bergulir untuk KSM, mengadministrasikan keuangan
- d) Menjalin kemitraan (*channeling*) dengan pihak-pihak lain yang mendukung program ekonomi UPK.

2) Unit Pengelola Lingkungan (UPL)

UPL berfungsi sebagai pengelola kegiatan penanggulangan kemiskinan bidang lingkungan perumahan dan permukiman dengan tugas-tugas sebagai berikut :

- a) Melakukan pendampingan penyusunan usulan kegiatan KSM / Panitia;
- b) Mengendalikan kegiatan-kegiatan pembangunan prasarana dasar lingkungan perumahan dan pemukiman yang dilaksanakan oleh KSM / Panitia Pembangunan;
- c) Motor penggerak masyarakat dalam membangun kepedulian bersama dan gerakan masyarakat untuk

penataan lingkungan perumahan dan pemukiman yang lestari, sehat dan terpadu;

- d) Menggali potensi lokal yang ada di wilayahnya;
- e) Menjalin kemitraan (*channeling*) dengan pihak-pihak lain yang mendukung program ekonomi UPL.

3) Unit Pengelola Sosial (UPS)

UPS berfungsi sebagai pengelola kegiatan penanggulangan kemiskinan bidang sosial dengan tugas-tugas sebagai berikut :

- a) Melakukan pendampingan penyusunan usulan kegiatan KSM/Panitia
- b) Mengendalikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KSM / Panitia bidang sosial Membangun / mengembangkan kontrol sosial masyarakat melalui media warga / infokom
- c) Memfasilitasi dan mendorong masyarakat / relawan dalam Komunitas Belajar Kelurahan / Desa (KBK/D)

6. Bentuk Kegiatan BKM

Bentuk kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)²⁶ adalah sebagai berikut:

²⁶ Ibid, hlm 21

- a. BKM dilatih merealisasi PJM Projangkis dan rencana Tahunannya dengan melakukan kegiatan pembangunan Tridaya (Sosial, Ekonomi dan Lingkungan) dengan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
- b. BKM dilatih melakukan kerjasama pembangunan dengan costsharing (dana BLM / APBN dan dana dari Pemda, lembaga usaha, perorangan dan/atau lembaga masyarakat lainnya) melalui kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET)
- c. BKM dilatih merealisasikan PJM Projangkis dengan melakukan kemitraan dengan Pemda, lembaga usaha, perorangan dan / atau lembaga masyarakat lainnya melalui kegiatan “*Channeling*” (Departemen Pekerjaan Umum).

C. Dasar Hukum Usaha Peningkatan Taraf Hidup

Hidup sejahtera adalah impian setiap manusia, dan kebahagiaan adalah hak setiap manusia. Dalam Islam bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah ibadah. Oleh karena itu peningkatan pendapatan sangat dianjurkan oleh agama sebagai upaya terhidar dari kemiskinan. Qs. Ar-Ra'd : 11:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ
بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ

Artinya : “ *Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sampai mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.* ”

Ayat ini menjelaskan bahwa ada kewajiban tersendiri bagi kita untuk merubah keadaan hidup “.

Kita jangan lupa dengan Firman Allah di dalam surat Asysyura ayat 27

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ
مَا يَشَاءُ ۗ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ

” *Dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba- hamba-Nya mereka akan melampaui batas di muka bumi, tetapi Allah menurunkanapa yang dikehendaki-Nya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui (keadaan) hamba-hamba-Nya lagi Maha Melihat “.*

Allah menganugerahkan kekayaan yang ada dimuka bumi untuk kitamanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan. Maka dari itu kita berkewajiban berusaha meningkatkan taraf hidup kita sebagai sarana ibadah kita kepada Allah. Ada sepenggal Hadis Rasulullah yang sangat populer oleh umat islam yakni

كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا

“Kemiskinan itu akan mendekati diri kepada kekufuran.”

Disini sangat jelas Allah membenci manusia yang tidak berusaha dalam hidupnya. Berbicara tentang BKM, telah dapat mengangkat kehidupan ekonomi masyarakat. BKM merupakan badan yang memiliki wewenang sebagai penggerak ekonomi masyarakat melalui unit-unit usaha yang dikelola bersama masyarakat. Melalui upaya tersebut, kehidupan masyarakat mengalami peningkatan dalam usaha dagang, pariwisata, dan sebagainya. Keadaan ini sangat dianjurkan agama karena BKM telah memberikan bantuan atau pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti firman Allah SWT dalam Q.S. Almaidah 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “ Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan

bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”

Demikian juga BKM memberikan bimbingan, memberi jalan, ataumenuntun orang lain kearah tujuan yang bermanfaat bagi hidupnya . Sebagaimana firman Allah dala Surah At-Taubah : 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : *“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana “.*

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia adalah subjek dari segala aspek kehidupannya. Untuk menjaga kesejahteraan dalam beriktihar Allah mengajurkan kita berbuat sesuatu yang bermanfaat member manfaat dan member motivasi untuk meningkatkan kualitas

kehidupan sebagai suatu upaya melaksanakan perintah Agama. Berikut dijelaskan kembali dalam hadits yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah,

Artinya : “Barang siapa yang membantu memenuhi kebutuhan saudaranya maka Allah akan memenuhi hajatnya, barang siapa yang melepaskan kesulitan seorang muslim maka Allah akan melepaskan kesulitannya pada hari kiamat, dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. ”(HR. Al-Bukhari No. 2442 dan Muslim No. 2580).

Sangat jelas bahwa dalam ayat ini, jika masyarakat melakukan ikhtiyar, maka Allah akan mempermudahnya. Dan Allah pasti akan berikan hasil sesuai dengan apa yang diusahakan oleh masyarakat. Dalam surat Ar-Ra’du Allah menegaskan kita untuk berbuat dan bertindak. Karena Allah hanya akan memberi kemudahan dan rejeki melimpah kepada orang-orang yang merubah keadaan mereka sendiri. Hal inipun dipertegas dalam Qs. An-Najm : 39

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Artinya : “ Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apayang telah diusahakannya.”

Disinilah BKM memiliki peran penting sebagai usaha untuk mensejahterakan masyarakat. Membantu masyarakat memobilisi dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki untuk meningkatkan taraf kehidupan atau kondisi ekonomi masyarakat itu sendiri.

D. Pengembangan Ekonomi Masyarakat

1. Pengertian Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Pengembangan Masyarakat (*Community Development*) adalah konsep dasar yang menggaris bawahi sejumlah istilah yang telah digunakan sejak lama seperti *community resource development*, *rural areas development*, *rural revitalisation*, dan *community based development*. Pengembangan masyarakat mempunyai dua makna dasar yang sangat penting; pertama pengembangan yang menunjukkan perubahan ke arah kemajuan yang terencana dan bersifat gradual, dan masyarakat yang menunjukkan kualitas hubungan sebuah relasi sosial. Keragaman dalam menginterpretasikan pengembangan masyarakat semakin meluas mulai perbedaan orientasi nilai budaya sampai dengan tujuan dari berbagai kalangan yang

menggunakan istilah tersebut. Ada yang bertujuan mengurus struktur kekuatan politik, meningkatkan kekuatan komunitas bisnis, dan pembangunan kebudayaan.

Pengembangan masyarakat digunakan sebagai cara untuk memperbaiki pelayanan dan fasilitas publik, menciptakan tanggung jawab pemerintah lokal, meningkatkan partisipasi masyarakat, memperbaiki kepemimpinan, membangun kelembagaan baru, melaksanakan pembangunan ekonomi dan fisik, dan mengembangkan perencanaan fisik dan lingkungan. Perdebatan selanjutnya menentukan apakah pengembangan masyarakat seharusnya dikontrol oleh suatu lembaga yang bersifat sentralitas atau kelompok masyarakat yang otonom.

PBB telah memberikan kontribusi sehingga pengembangan masyarakat sebagai suatu gerakan sosial dengan perhatian utama pada pembangunan desa di dunia ketiga. Selanjutnya gerakan sosial tersebut melakukan inisiasi dan memberikan dukungan pada pengembangan masyarakat dari perspektif internasional. Karena bagi PBB pengembangan masyarakat adalah *“process by which the efforts of the people themselves are united with those of governmental authorities to improve the economic, social and cultural conditions of communities, to integrate the communities into the life of the nation and to enhance the contribute fully to*

national progress”Maka arah pengembangan masyarakat ini harusnya dikelompokkan menjadi beberapa tahapan. Karena sejatinya pengembangan masyarakat adalah proses horisontal dalam internal kelompok masyarakat itu sendiri, kemudian melakukan persentuhan dengan berbagai kebijakan pemerintah. Sentuhan relasi tersebutlah yang diharap mampu membawa pengembangan masyarakat mencapai fungsi maksimalnya.

Arah pengembangan masyarakat harus dipahami sebagai sebuah proses. Bentuk pengembangan tidak boleh stagnan dan berhenti dalam sebuah titik semata, “being” harus dimakanai sebagai proses yang akan selalu menemukan bentuk baru dalam menemukan bentuk yang paling tepat dalam pengembangan masyarakat. Selain sebagai proses, juga harus dimaknai bahwa pengembangan masyarakat merupakan sebuah metode. Metode ini seperti strategi doble standard dimana tidak harus terpaku pada proses pengembangan masyarakat secara internal semata, melainkan juga harus merangkul pemerintah untuk menelurkan kebijakan yang dapat mendukung perkembangan²⁷

²⁷ Fredian Tonny, *Pengembangan Masyarakat*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia : 2014, hlm 12

2. Bentuk-Bentuk Pengembangan Ekonomi

- a. Pengembangan kapasitas dan akses ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah melalui strategi pengembangan kelembagaan dan kegiatan usaha Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di level komunitas/kelurahan melalui kegiatan Peningkatan Penghidupan Masyarakat berbasis Komunitas (PPMK), serta pengembangan akses pasar, produk dan kapasitas SDM bagi KSM pada level kabupaten/kota melalui kegiatan Pusat Pengembangan Usaha (*Business Development Center/BDC*).
 - b. Pengembangan kapasitas dan akses ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah tersebut, maka dirumuskan strategi perluasan akses pembiayaan bagi masyarakat miskin / berpenghasilan rendah melalui kegiatan pengembangan layanan Keuangan Mikro UPK-BKM di level komunitas/kelurahan melalui pendekatan konvensional/syariah dan pengembangan kemudahan akses transaksi dan layanan melalui *Digital Financial Services* (DFS), serta pengembangan layanan keuangan mikro di level kabupaten / kota melalui Federasi UPK.
-

BAB III

PERAN BKM ARTA KAWULA DI KELURAHAN KROBOKAN KECAMATAN SEMARANG BARAT

A. Gambaran Umum BKM Arta Kawula

1. Sejarah Berdirinya BKM Arta Kawula

Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Arta Kawula sekarang ini telah “direvitalisasi” dari sebelumnya yang terfokus pada penanggulangan kemiskinan, kini berorientasi ke penanganan kumuh melalui Program Kotaku. BKM merupakan lembaga pimpinan kolektif yang pada hakekatnya mengandung pengertian sebagai wadah masyarakat untuk bersinergi dan menjadi lembaga kepercayaan milik masyarakat, yang diakui baik oleh masyarakat sendiri maupun pihak luar, dalam upaya masyarakat membangun kemandirian menuju tatanan masyarakat madani (*civil socitey*), yang dibangun dan dikelola berlandaskan berbasis nilai-nilai universal (*value based*).

Sebagai wadah masyarakat bersinergi, BKM berbentuk pimpinan kolektif, dimana keputusan dilakukan secara kolektif melalui mekanisme rapat anggota BKM, dengan musyawarah mufakat menjadi norma utama dalam seluruh proses pengambilan keputusan. Sedangkan sebagai lembaga kepercayaan (*'board of trusty'*), anggota-anggota BKM terdiri

dari orang-orang yang dipercaya warga, berdasarkan kriteria kemanusiaan yang disepakati bersama dan dapat mewakili masyarakat dalam berbagai kepentingan, termasuk kerjasama dengan pihak luar.

Pengertian *board of trustee* pada satu sisi merujuk pada keberadaan BKM yang harus mengakar, *representatif*, dan *aspiratif*, serta beranggotakan kumpulan warga yang ikhlas, adil, jujur, dan tidak dibayar untuk pengabdianya, sehingga menjadi tumpuan kepercayaan masyarakat. Sedangkan pada sisi lain, BKM sebagai lembaga kepercayaan milik masyarakat juga harus mampu diakui dan dipercaya oleh pihak-pihak lainnya.

Dengan demikian, kedudukan dan posisi BKM adalah sebagai lembaga masyarakat yang benar-benar dibangun dari, oleh dan untuk masyarakat sebagai representasi upaya-upaya untuk membangun sinergi segenap potensi masyarakat menuju tatanan masyarakat madani, yang senantiasa berbasis keikhlasan dan kerelawanan, keadilan serta kejujuran.

Berakhirnya periodisasi kepengurusan BKM Arta Kawula dengan prosesi pemilihan anggota-anggota (*pemilu bkm*) dapat dijadikan momentum awal revitalisasi peran & fungsi BKM yang memenuhi kriteria dan sifat lembaga pimpinan kolektif masyarakat warga yang berbasis nilai, sesuai koridor

KOTAKU. Anggota BKM secara prinsip merupakan representasi dari warga masyarakat kelurahan yang paling dipercaya, ikhlas, jujur, adil, peduli dan tanpa pamrih, sehingga bukan sebagai wakil kewilayahan, golongan atau perwakilan kelompok masyarakat.

Menjadi anggota BKM, adalah kesempatan dan kepercayaan dari masyarakat untuk memberi, ber-kontribusi peduli, berkorban, dan secara ikhlas berbuat nyata bagi warga miskin yang ada di wilayahnya. Adanya kesempatan dan kepercayaan itulah merupakan imbalan yang tak ternilai harganya, apalagi dibandingkan materi atau status, karena mereka dapat berbuat baik terhadap sesama, khususnya kaum miskin dan tertinggal / marjinal.

Tidak ada satu pun anggota BKM yang memiliki hak istimewa (*privilege*) dan semua hasil keputusan 'BKM' ditetapkan secara kolektif melalui mekanisme Rapat Anggota BKM. Anggota-anggota BKM dipilih oleh seluruh utusan-utusan warga setempat dengan kriteria kualitas sifat kemanusiaan atau track record perbuatan baik dan mekanisme pemilihan tanpa kampanye, tanpa pencalonan serta secara tertulis dan rahasia.

Utusan-utusan warga adalah warga pilihan masyarakat RT./RW. yang dipilih dengan mekanisme dan kriteria yang

sama. Dalam hal ini, masyarakat warga RT./RW. mengadakan rembug untuk menuliskan 3 orang terbaik sebagai utusan warga yang akan menjadi pemilih pada pemilihan anggota BKM di tingkat kelurahan.

Utusan-utusan warga pilihan masyarakat (RW.) yang ada itulah yang akan menjadi peserta sekaligus memiliki hak memilih dan dipilih pada rapat pemilihan anggota BKM baru. Dan selanjutnya proses pemilihan pengurus BKM dapat dilakukan dengan berpedoman Tata Tertib Pemilihan Pengurus BKM Arta Kawula yang telah ditetapkan 12 September 2018 yang lalu.

2. Struktur Organisasi BKM Arta Kawula

Acara pemilihan pengurus BKM Arta Kawula Krobokan Jum'at, 30 November 2018, telah berhasil memilih 13 pengurus baru dengan Heri Herantoro, S.H. sebagai Koordinator BKM Arta Kawula untuk masa bakti 2019-2022. Hadir pula pada kesempatan tersebut seluruh pengurus lama, TIM FASKEL 07, para undangan lainnya. Kehadiran seluruh utusan dari RW.I sampai dengan RW.XIII menjadikan pelaksanaan pemilihan tersebut sebagai wujud representasi dari warga masyarakat kelurahan yang paling dipercaya, ikhlas, jujur, adil, peduli dan tanpa pamrih, sehingga bukan sebagai wakil kewilayahan, golongan atau perwakilan kelompok masyarakat. Masing-

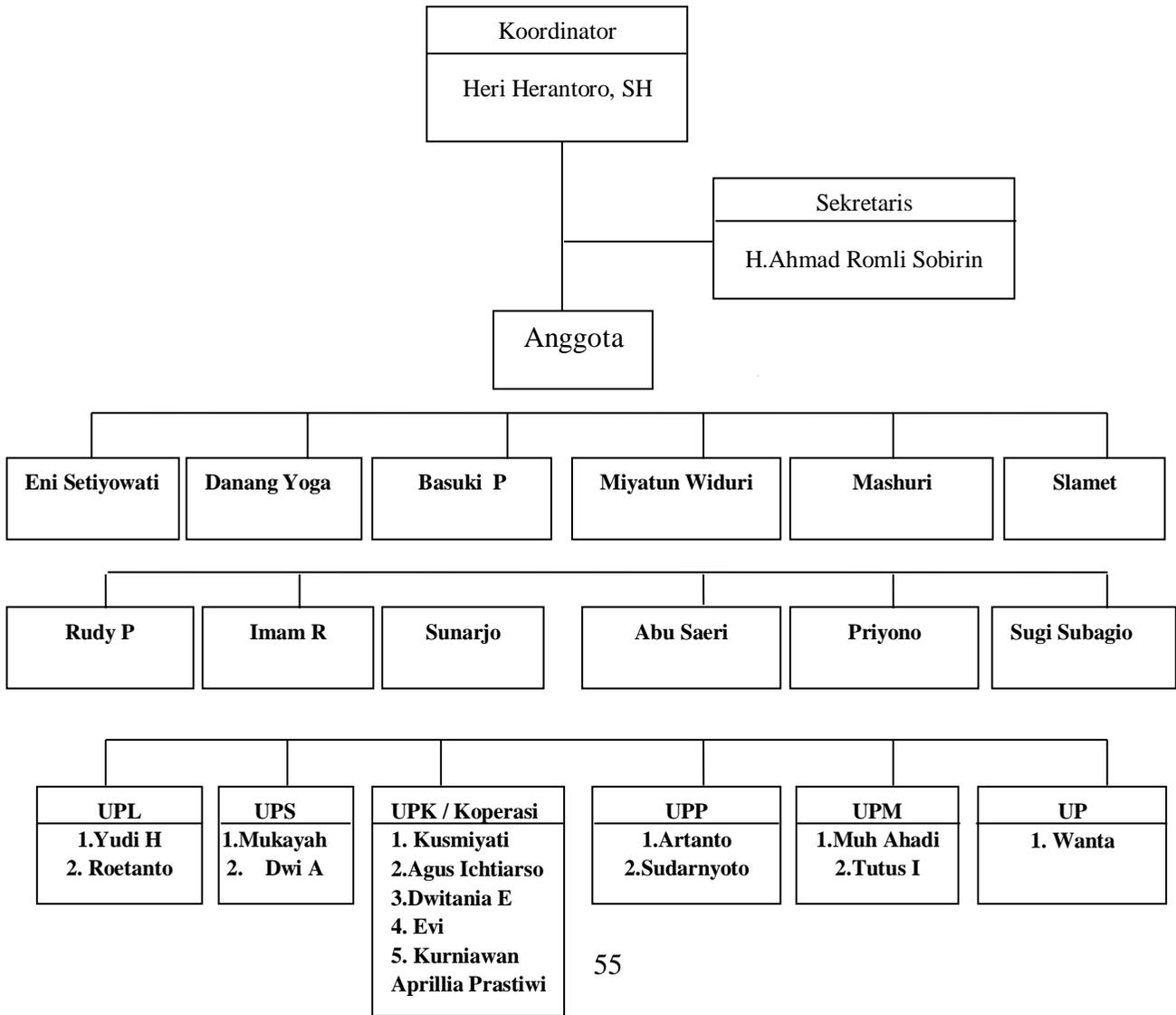
masing RW mengirimkan 3 utusan hasil terbaik dari pemilihan ditingkatannya, sehingga 39 utusan berhak mengikuti prosesi tersebut. Namun kehadiran 1 utusan yang terlambat, membuat 38 utusan saja yang berhak memilih dan di pilih.

Proses pemilihan pengurus dipimpin langsung oleh Panitia Pemilu BKM Arta Kawula yaitu Saudara Yudi Hartoto, S.H. sebagai ketua dan Bapak H. A. Romli Sobirin sebagai sekretaris dan Saudara Artanto Prastowo sebagai anggota. Sidang pemilihan pertama ditetapkan untuk mencari 13 pengurus dengan pemungutan suara. Dalam pemungutan suara pertama ini, hanya menghasilkan urutan terbanyak 11 orang saja. Hal ini dikarenakan ada 5 suara yang berjumlah sama. Akhirnya dilakukan pemungutan suara untuk mencari 2 orang lagi dari 5 suara tersebut sehingga genaplah 13 orang terpilih sebagai pengurus baru yang selanjutnya dilakukan pemungutan suara untuk memilih koordinator.

Adapun 13 pengurus BKM Arta Kawula masabakti 2019-2022 yang terpilih adalah sebagai berikut:

1. Heri Herantoro, S.H. (Koordinator)
2. Eni Setiyowati (Anggota)
3. Danang Yoga (Anggota)
4. H. Basuki Purwanto, B.E. (Anggota)
5. Hj. Miyatun Waduri (Anggota)

6. Mashuri (Anggota)
7. Slamet (Anggota)
8. Rudy Priyowitanto (Anggota)
9. Imam Ristanto, S.T. (Anggota)
10. Drs. Sunarjo, MS. (Anggota)
11. Abu Sairi (Anggota)
12. Sugi Subagio (Anggota)
13. Drs. Priyono (Anggota)



BKM pada dasarnya mencerminkan kondisi kesiapan masyarakat untuk secara mandiri menangani persoalan kemiskinan dan penataan lingkungan permukimannya secara berkelanjutan (*sustainable development*). Dengan demikian, BKM Arta Kawula berpotensi untuk bisa berkolaborasi dengan pihak pemerintah kota, swasta, kelompok peduli dan para pihak lain di wilayah setempat dalam rangka aktualisasi secara nyata prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (Tridaya) yaitu kegiatan penanganan kumuh dan pencegahan meluasnya kumuh di perkotaan yang dilakukan secara komprehensif, antara penanganan fisik/infrastruktur, pengembangan ekonomi (*Local Economic Development*) dan kegiatan sosial (aturan bersama, perubahan sikap & perilaku, PHBS, dll). Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan dan permukiman yang disepakati seluruh masyarakat setempat, baik dengan sumber dana KOTAKU maupun sumber dana lainnya (channeling), BKM perlu membentuk unit-unit pengelola sesuai kebutuhan, yang setidaknya terdiri dari: Sekretariat, Unit Pengelola Keuangan (UPK), Unit Pengelola Lingkungan (UPL), dan Unit Pengelola Sosial (UPS).

1) Sekretariat.

Dalam upaya peningkatan pelayanan, perencanaan dan pengelolaan program BKM Arta Kawula, kesekretariatan merupakan salah satu fungsi yang sangat penting. Oleh karena itu kinerja kesekretariatan diharapkan dapat mengorganisasikan kepentingan pengurus dan UP-UP dalam menjalankan programnya. Adapun atas hasil rapat pengurus BKM Arta Kawula pada tanggal 17 Pebruari 2019 ditetapkan pengurus Sekretariat adalah :
H. Ahmad Romli Sobirin

2) Unit Pengelola Keuangan (UPK)

UPK akan bertanggung jawab terhadap pengelolaan pinjaman bergulir, akses channeling ekonomi, dan akses kegiatan yang berkaitan dengan pemupukan dana atau akses modal masyarakat melalui Koperasi Arta Kawula. Meskipun akses kegiatan yang berkaitan dengan pemupukan dana atau akses modal masyarakat sudah melalui Koperasi Arta Kawula, namun dalam kinerja keorganisasian BKM, tugas UPK bersama-sama dengan kesekretariatan masih melakukan secara terus menerus / periode dengan melaporkan, mencatat kegiatan keuangan BKM.

Adapun atas hasil rapat pengurus BKM Arta Kawula pada tanggal 17 Pebruari 2019 ditetapkan pengurus Sekretariat adalah sebagai berikut:

1. Kusmiyati : Manajer UPK
2. Agus Ichtiarso : Marketing, Survey dan penagihan
3. Dwitania Excellita : Pembukuan
4. Evi Kurniawati : Kasir
5. Aprillia Prastiwi : Pelayanan Listrik, PDAM dan telpon

3) Unit Pengelola Lingkungan (UPL)

UPL bertanggung-jawab dalam hal penanganan Rencana Perbaikan Kampung, Penataan dan Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Perumahan dan Permukiman, Good Governance di bidang Permukiman, dan lain-lain. UPL diharapkan melakukan peningkatan kualitas, pengelolaan serta penjegahan timbulnya permukiman kumuh baru, dengan kegiatan – kegiatan pada entitas kelurahan, serta kawasan dan kota. Kegiatan penanganan kumuh ini meliputi pembangunan infrastruktur serta pendampingan social dan ekonomi untuk berkelanjutan penghidupan masyarakat yang lebih baik dilokasi permukiman kumuh. Adapun atas hasil

rapat pengurus BKM Arta Kawula pada tanggal 17 Pebruari 2019 ditetapkan pengurus Sekretariat adalah :

1. Yudi Hartanto, SH
2. Ir. Roetanto

4) Unit Pengelola Sosial (UPS)

UPS didorong untuk mengelola relawan-relawan dan hal-hal yang berkaitan dengan kerelawanan, mengelola pusat informasi dan pengaduan masyarakat (termasuk media warga untuk sarana kontrol sosial), penanganan *Good Governance*, penanganan kegiatan sosial, dan lain-lain sesuai kesepakatan masyarakat setempat. UPS berkewajiban menumbuhkan solidaritas serta kesatuan sisoal dalam menggalang kepedulian dan kebersamaan gerakan warga dalam menanggulangi kemiskinan dan permukiman secara mandiri dan berkelanjutan. Adapun atas hasil rapat pengurus BKM Arta Kawula pada tanggal 17 Pebruari 2019 ditetapkan pengurus Sekretariat adalah :

1. Mukayah
2. Dwi Astuti

5) Unit Pengaduan Masyarakat (UPM)

Dalam upaya menciptakan transparansi dan monitoring terhadap kepentingan BKM dan masyarakat

perlu dibentuk Unit pengaduan Masyarakat yang diharapkan dapat menjadi pelaksana layanan pengaduan masyarakat, pelaksanaan pengelola data permintaan informasi dan pengaduan dari masyarakat akan terdokumentasi dan dilaporkan serta ditindaklanjuti sebagai masukan untuk memperkuat kelembagaan BKM yang lebih baik. Adapun atas hasil rapat pengurus BKM Arta Kawula pada tanggal 17 Pebruari 2019 ditetapkan pengurus Sekretariat adalah :

1. Drs. Muh Ahadi
2. Tutus Irawan

6) Unit Pengawas (UP)

Dalam upaya melakukan penikaian dan pembiaanaan serta pelaksanaan fungsi-fungsi supervisi perlu dibentuk unit pengawas (UP) yang diharapkan dapat menjdi pengawas pelaksanaan penilaian terhadap proses dan hasil program kegiatan BKM baik dan keuangan maupun kegiatan lainnya. Memperkuat kelembagaan BKM yang lebih baik. Adapun atas hasil rapat pengurus BKM Arta Kawula pada tanggal 17 Pebruari 2019 ditetapkan pengurus Sekretariat adalah :

1. Wanta, SE

7) Unit Pengelola Pelatihan (UPP)

Dalam Upaya membangun kapital sosial agar saling bekerja sama demi kebaikan, kepentingan dan kebutuhan bersama, perlu dibentuk Unit Pengelola Pelatihan (UPP), yang diharapkan dapat menjadi pelaksana kegiatan pelatihan dan monitoring serta evaluasi dalam pengembangan kapasitas kerelawanan sebagai ciri khas BKM sehingga mampu memperkuat kemandirian masyarakat untuk menuju tatanan masyarakat madani. Adapun atas hasil rapat pengurus BKM Arta Kawula pada tanggal 17 Pebruari 2019 ditetapkan pengurus UPP sebagai berikut:

1. Artanto Prastowo
2. Sudarnyoto.

Oleh karena itu, unit-unit Pelaksana tersebut berkewajiban memberikan informasi dan laporan perkembangan dari masing-masing kegiatan yang menjadi tugas pokoknya, mengusulkan draft konsep pengembangan, serta memberikan pertanggungjawaban berkala maupun akhir kepada BKM. Termasuk juga memberikan saran-saran dan masukan-masukan secara profesional kepada BKM untuk menjadi dasar pertimbangan BKM dalam mengambil kebijakan

maupun keputusan yang diperlukan. Anggota-anggota BKM tidak diperkenankan merangkap menjadi pengelola dari unit-unit tersebut. Unit-Unit Pelaksana akan dipimpin seorang manajer, atau istilah lain, dan beberapa staf sesuai kebutuhan yang dipilih melalui Rapat Anggota BKM, berdasarkan kriteria kemampuan di bidangnya masing-masing. BKM mengawasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh unit-unit pelaksana sesuai bidang kegiatannya, yakni UPL, UPS, dan UPK.

3. Visi – Misi BKM Arta Kawula

- a. Visi : Mewujudkan wargakelurahanKrobokan sebagai warga yang sejahtera dan Makmu
- b. Misi : Meningkatkan pendapatan Masyarakat miskin melalui penyediaan pemodal dan pelatihan ketrampilan usaha
- c. Menyediakan sarana dan prasarana dasar pendukung kegiatan ekonomi, sosial dan Budaya
- d. Membangun ikatan dan kepedulian sosial masyarakat terhadap anggota Masyarakat lainnya yang sangat membutuhkan.

Sesuai dengan landasan keberadaannya. BKM dan Unit-unit pelaksana (UPL, UPS dan UPK) harus senantiasa berorientasi pada upaya-upaya untuk melayani

masyarakat miskin dan meningkatkan kesejahteraannya. Oleh karena itu, dalam kebijakan dan keputusan mengenai pelayanan unit-unit pelaksana didasarkan pada pertimbangan kemampuan warga miskin dan warga termiskin yang ada di wilayahnya. Meskipun demikian, dalam rangka meningkatkan kapasitas pelayanan kepada warga miskin dan termiskin di wilayahnya, maka BKM sesuai dengan kapasitas dan kebutuhannya, diperkenankan pula untuk mengembangkan berbagai jenis pelayanan yang bersifat pemupukan dana dan produktif.

Kegiatan pengembangan usaha BKM tersebut tidak boleh dilakukan secara langsung oleh BKM, melainkan dengan memfasilitasi terbentuknya koperasi oleh KSM-KSM maupun anggota-anggotanya yang dinilai telah berkembang atau dengan membentuk Unit Pelayanan Ekonomi (UPE) atau Perusahaan untuk melayani kegiatan usaha produktif ataupun kegiatan ekonomi yang bersifat menguntungkan. Pembentukan UPE, PT atau badan usaha lainnya tidak boleh diputuskan secara sepihak oleh anggota BKM saja, namun harus ditetapkan melalui mekanisme rembug warga masyarakat setempat di tingkat kelurahan. Ketentuan mengenai hal ini akan diatur dalam Pedoman Khusus KOTAKU.

Demikian pula dalam hal pembentukan koperasi tidak dilakukan BKM secara institusi, namun oleh kumpulan warga non miskin atau KSM-KSM atau anggota-anggota KSM dengan mengacu pada UU Koperasi yang berlaku.

B. Gambaran Kelurahan Krobokan Semarang Barat

Profil Kelurahan Krobokan merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang yang terbentuk berdasarkan surat keputusan Walikota Semarang. Kondisi masyarakat Kelurahan Krobokan sangat heterogen, yang berarti hampir seluruh penduduk yang berdomisili disana sangatlah beragam. Oleh karena itu, diperlukan pola-pola tertentu dalam rangka pembinaan kepada masyarakat secara berkesinambungan agar terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kelurahan Krobokan mempunyai wilayah seluas 82,50 Ha dengan ketinggian 5 m di atas permukaan air laut, yang terbagi menjadi 91RT dan 13 RW.



Gambar 3.1

Peta Kelurahan Krobokan

Kelurahan Krobokan merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Semarang Barat dengan jumlah penduduk sebanyak 15.563 jiwa. Kelompok umur di Kelurahan Krobokan terdiri dari usia 0-75. Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara : Kelurahan Tawang Mas
2. Sebelah Selatan : Jl. Jendral Sudirman
3. Sebelah Timur : Sungai Banjir Kanal Barat
4. Sebelah Barat : Kelurahan Karangayu

Wilayah Kelurahan Krobokan memiliki suhu yang hampir sama dengan suhu wilayah-wilayah di Kota Semarang yang menurut Badan Meterologi, Klimatologi dan Geofisika rata-rata

berkisar antara 35 0C – 36 0C Jumlah penduduk Kelurahan Krobokan sebanyak 15563 jiwa yang terbagi menjadi 5156 KK,dengan demikian kepadatan penduduk wilayah iniberkisar 18.864,24 jiwa/km. Struktur organisasi Kelurahan Krobokan adalah sebagai berikut :

- 1) Lurah : Sarno,S.Sos.,MA
- 2) Sekertaris : Retno Setyaningsih
- 3) Seksi Pemerintahan dan Pembangunan : Sri Lestari
- 4) Seksi Kesejahteraan Sosial : Dwi Pujiastuti, SE
- 5) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum : Ariyanto

Kelurahan Krobokan merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Semarang Barat dengan jumlah penduduk sebanyak 15.563 jiwa. Kelompok umur di Kelurahan Korobokan terdiri dari usia 0-75 dikelompokkan menjadi kelompok umur produktif dan non produktif. Kelompok umur produktif adalah penduduk berusia 15-55 tahun, sedangkan kelompok usia non produktif adalah penduduk yang berusia kurang dari 15 tahun dan lebih dari 55 tahun. Kelurahan Krobokan memiliki penduduk produktif jauh lebih banyak dari pada usia non produktif. 5 Untuk lebihjelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1 Jumlah penduduk Menurut Usia dan Jenis Kelamin

NO	Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	466	563	1059
2	5-9	491	561	1052
3	10-14	483	563	1046
4	15-19	193	613	806
5	20-24	599	697	1296
6	25-29	458	654	1112
7	30-34	516	416	932
8	35-39	692	635	1.327
9	40-44	601	666	267
10	45-49	792	681	473
11	50-54	507	680	187
12	55-59	432	598	030
13	60-64	378	501	879
14	65-69	313	381	694
15	70-74	201	96	297
16	75+	25	81	106
Jumlah		7753	7810	15563

Sumber: Data Monografi Kelurahan Krobokan tahun 2018

Dari tabel 3.2 diketahui bahwa penduduk Kelurahan Krobokan dilihat dari segi pendidikan, elum sekolah sebanyak 1404 orang, tidak tamat sekolah dasar sebanyak 998 orang, tamat SD sederajat sebanyak 1315 orang, tamat SLTPsederajat sebanyak 2290 orang, tamat SLTA sederajat sebanyak 3836 orang, tamat Akademik sederajat sebanyak 3836, tamat perguruan tinggi sederajat sebanyak 1630 orang. Dilihat dari data tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk Kelurahan Krobokan adalah tamat SLTA.

Tabel 3.2 Jumlah Lembaga Pendidikan

No	Jenis lembaga Pendidikan	Negeri	Swasta	Jumlah
1	PAUD	1	2	3
2	TK	2	8	10
3	SD	1	2	3
4	SLTP	1	2	3
5	SLTA	0	0	0
6	Raudhotul Athfal	0	1	1
7	Pondok Pesantren	0	1	1
8	Sekolah Minggu	0	0	0
	JUMLAH			30

Sumber: Data Monografi Kelurahan Krobokan 2018

**Tabel. 3.3 Jumlah Penduduk Menurut Mata
Pencapaian**

NO	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH
1	Buruh Bangunan	124
2	Pegawai Ngeri Sipil	276
3	Nelayan	14
4	TNI	24
5	Buruh Industri	1174
6	Pedagang	189
7	Industri Kecil	246
8	Pengusaha Besar	24
9	Pengangkutan	31
10	Peternak	1
JUMLAH		2103

Sumber: Data Monografi Kelurahan Krobokan 2018

Berdasarkan tabel 3.3 diketahui penduduk Kelurahan Krobokan dilihat dari mata pencapaian, buruh bangunan sebanyak 124 orang, pegawai negeri sipil sebanyak 276 orang, nelayan sebanyak 14 orang, TNI sebanyak 24 orang, buruh industri sebanyak 1174 orang, pedagang sebanyak 189 orang,

industri kecil sebanyak 246 orang, pengusaha besar sebanyak 24 orang, pengangkutan sebanyak 31 orang, dan peternak 1 orang.

C. Peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Arta Kawula di Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat.

Sebagai lembaga BKM Arta Kawula dapat bertindak sebagai representasi masyarakat warga penduduk di Kelurahan Krobokan. Peran Badan Keswadayaan masyarakat (BKM) Arta Kawula menjadi wadah perjuangan kaum miskin dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhan mereka, sekaligus menjadi motor bagi upaya penanggulangan kemiskinan melalui program ekonomi bergulir yang dijalankan oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.

1. Peran BKM Arta Kawula dalam Menumbuhkan Ekonomi Masyarakat

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara kepada koordinator BKM Arta Kawula sebagai berikut:

“Menumbuhkan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin agar mampu meningkatkan kesejahteraan mereka melalui UKM – UKM warga masyarakat Kelurahan Korbokan.”(wawancara pada tanggal 7 juni 2020).²⁸

²⁸ Wawancara kepada Heri Herantoro selaku koordinator BKM Arta Kawula pada tanggal 7 juni 2020

Pendapat yang sama anggota KSM Ibu Wir yaitu:

“memanfaatkan dana bergulir ini untuk lebih mengembangkan usahanya bersama anggota kelompok dan dana bergulir memberikan manfaat yang besar dalam kehidupan ekonominya. (wawancara pada tanggal 14 Juni 2020).²⁹

BKM Arta kawula bertindak sebagai motor penggerak senantiasa menumbuhkan solidaritas serta kesatuan sosial untuk menggalang kepedulian dan kebersamaan gerakan masyarakat warga dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan permukiman secara mandiri dan berkelanjutan. Selain bertindak sebagai motor penggerak, BKM Arta Kawula juga mengorganisasi warga untuk merumuskan program jangka menengah (5 tahun) penanggulangan kemiskinan dan permukiman maupun rencana tahunan secara partisipatif. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala kelurahan Krobokan Semarang Barat (wawancara pada tanggal 7 Juni 2020)³⁰.

Didasarkan informasi dari anggota KSM menyebutkan peran BKM Arta Kawula kelurahan Krobokan mampu

²⁹ Wawancara dengan anggota KSM Ibu Wir pada tanggal 14 Juni 2020

³⁰ Wawancara kepada Heri Herantoro selaku koordinator BKM Arta Kawula pada tanggal 7 juni 2020

meningkatkan pendapatannya, juga dapat membantu meningkatkan penghasilan orang-orang di sekitarnya dengan cara menciptakan lapangan pekerjaan. (wawancara pada tanggal 14 Juni 2020)³¹

2. Peran BKM Arta Kawula dalam mengelola konflik antar anggota

Peran BKM Arta Kawula dalam mengelola konflik adalah dengan mengadakan pendekatan agar dapat menyatukan visi dan misi, antara lain dengan sosialisasi yang terus menerus dan memberikan contoh konkrit untuk selalu berorganisasi yang bersih, transparan, membarikan penyuluhan tentang manfaat program pembangunan dengan mengikut sertakan masyarakat secara mandiri dalam pelaksanaanya, BKM lebih selektif dalam memverifikasi proposal yang masuk, apabila ada KSM yang bermasalah maka BKM menindak lanjuti dengan memberikan sanksi. BKM Arta Kawula juga sangat membantu dalam memberikan informasi pada masyarakat, terutama masyarakat miskin yang akan di berdayakan, dengan dibentuknya KSM, yang terdiri dari masyarakat dimasing-masing dusun. BKM segera memberitahu dan meminta KSM untuk membuat rencana atau proposal kegiatan. Setelah dana

³¹ Wawancara dengan anggota KSM pada tanggal 14 Juni 2020

diserahkan kepada KSM maka realisasi program dan pertanggungjawaban penggunaan dana berada pada masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh anggota KSM sebagai berikut:

“Untuk tahun awal masih banyak hambatan atau konflik antar anggota yang dihadapi antara lain masih menyamakan program BKM dengan program pemerintah terdahulu, dan masyarakat belum paham tentang tanggung jawab dan mengagap bahwa uang pemerintah tidak perlu dikembalikan, hal ini dapat diatasi dengan sosialisasi melalui forum RT, RW, Desa dan memberikan contoh konkrit untuk selalu berorganisasi yang bersih, transparan, terbuka, serta prestasi yang kita raih”. (wawancara pada 20 Juli 2020).³²

Pendapat yang sama diungkapkan oleh bapak YP ketua KSM sebagai berikut:

“Partisipasi masyarakat mutlak diperlukan dalam setiap tahap kegiatan, tidak terkecuali pada tahap identifikasi masalah yang cukup menentukan dalam pelaksanaan kegiatan tahap berikutnya. Masalah-masalah yang terdapat pada suatu masyarakat apabila dapat teridentifikasi sejak awal, akan lebih mudah dicarikan jalan keluarnya dibandingkan dengan masalah yang terlambat diketahui atau sengaja dibiarkan.” (wawancara pada 25 Juli 2020)³³

³² Wawancara dengan anggota KSM pada 20 Juli 2020

³³ Wawancara dengan bapak YP ketua KSM pada tanggal 25 Juli 2020

3. Peran BKM Arta Kawula dalam menjalin kerja sama dan saling memotivasi

Peran BKM dalam menjalin kerja sama dan memotivasi adalah menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya membangun organisasi masyarakat untuk menanggulangi persoalan bersama yaitu penanggulangan kemiskinan, tahapan ini dilakukan dengan sosialisasi oleh pihak fasilitator Kelurahan ke setiap dusun yang ada di Kelurahan Krobokan (Koordinator BKM)

Seperti yang diungkapkan oleh anggota KSM yaitu:

“Pelaksanaan kegiatan pemecahan masalah dilaksanakan melalui pendampingan dan pembelajaran kepada masyarakat melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Dibentuknya KSM berguna untuk membantu mengembangkan sumber daya masyarakat dengan meningkatkan keberdayaannya, guna mengatasi berbagai permasalahan pokok baik yang menyangkut permodalan, prasarana lingkungan serta masalah sosial. Pembentukan KSM ini didasari dengan tujuan agar masyarakat lebih termotivasi dengan program-program BKM Arta Kawula. KSM tidak harus dibentuk baru, namun dapat mengembangkan kerja sama dan memotivasi antar kelompok-kelompok yang sudah ada di masyarakat seperti kelompok pedagang dan lain sebagainya” (wawancara pada 20 Juli 2020).³⁴

³⁴ Wawancara dengan anggota KSM pada 20 Juli 2020

Pendapat yang sama seperti yang diungkapkan oleh anggota BKM yaitu:

“Untuk menanggulangi setiap persoalan, langkah-langkah pemecahan masalah dilakukan oleh BKM Arta kawula, dengan adanya kerja sama melalui pertemuan warga yang diprakarsai oleh BKM, didampingi Fasilitator Kelurahan (Faskel) dengan strategi diskusi terarah,” (wawancara pada 25 Juli 2020)³⁵

4. Peran BKM Arta Kawula dalam pengembangan masyarakat melalui program ekonomi bergulir

Peran serta masyarakat kelurahan Krobokan dalam proses awal perguliran dana bergulir yaitu mulai dari pengisian administrasi dan juga pengisian proposal untuk mengajukan pinjaman. Proposal dalam kegiatan dana bergulir ini telah disediakan, masyarakat yang akan mengajukan pinjaman tinggal melengkapi data yang dibutuhkan, yaitu profil anggota dan jenis usaha yang akan dijalankan, dalam proposal ini juga terdapat blanko permohonan yang harus ditandatangani oleh setiap anggota. Meskipun tahap pengajuan dana bergulir tidak rumit, namun penerima dana ini diseleksi dengan cukup ketat. Hal

³⁵ Wawancara dengan anggota BKM pada tanggal 25 Juli 2020

ini dibuktikan dengan adanya beberapa kali verifikasi data atau penilaian di dalam proses perguliran dana ini. Seperti yang diungkapkan oleh kelurahan Krobokan Semarang Barat (wawancara pada tanggal 14 Juni 2020).³⁶

Pendapat yang sama disampaikan oleh anggota KSM Ibu Rini yaitu:

“Dengan adanya peran BKM Arta Kawula sangat membantu masyarakat kurang mampu seperti, sebelum mengenal dana bergulir, informan tersebut meminjam modal untuk biaya warungnya ke rentenir atau oleh masyarakat sekitar sering disebut sebagai mendreng. Setelah mengenal dana bergulir, anggota KSM tersebut lebih memilih meminjam modal melalui program dana bergulir. Ibu Rini juga mengungkapkan bahwa meminjam modal melalui dana bergulir lebih enak dibandingkan meminjam modal di Bank ataupun mendreng. Selain itu, pinjaman dana bergulir ini juga memiliki bunga pinjaman yang rendah yaitu 1,5% jadi lebih meringankan”(wawancara pada tanggal 14 Juni 2020)³⁷

BKM Arta Kawula dalam mengorganisasikan warga secara partisipatif membawa dampak yang positif terhadap masyarakat di kelurahan krobokan, karena masyarakat lebih merasakan manfaat dari program ekonomi bergulir yang

³⁶ Wawancara dengan Kepala kelurahan Krobokan Semarang Barat pada tanggal 7 juni 2020

³⁷ Wawancara anggota KSM Ibu Rini pada tanggal 14 Juni 2020

menjadi program untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dibidang ekonomi. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Heri Herantoro koordinator BKM Arta Kawula (wawancara pada tanggal 7 Juni 2020).³⁸

Seperti yang diungkapkan oleh anggota KSM yaitu:

“Berbagai usaha sudah banyak yang dijalani masyarakat kelurahan Krobokan, namun dengan adanya dana bergulir, mulai dari usaha ternak, pertanian, membuka warung sembako atau warung sayur sampai kepada industri rumahan cukup membuahkan hasil.” (wawancara pada tanggal 14 Juni 2020)³⁹

Pendapat yang sama seperti yang diungkapkan oleh bapak W anggota BKM yaitu:

“Program ekonomi bergulir sangat membantu masyarakat, bagi yang sudah punya usaha, mereka mampu mengembangkan usahanya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya dan bagi yang belum memiliki usaha dengan adanya dana bergulir bisa mulai membuka usaha” (wawancara pada 25 Juli 2020)⁴⁰

³⁸ Wawancara kepada Heri Herantoro selaku koordinator BKM Arta Kawula pada tanggal 7 juni 2020

³⁹ Wawancara dengan anggota KSM pada tanggal 14 Juni 2020

⁴⁰ Wawancara dengan bapak W anggota BKM pada tanggal 25 Juli 2020

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti di Kelurahan Krobokan Semarang Barat diketahui keberhasilan BKM Arta kawula dalam mengelola kegiatan ini juga dapat dilihat dari peran serta masyarakat dalam mengelola dana bergulir ini. Dengan adanya kegiatan dana bergulir, selain mendapatkan pinjaman, anggota kelompok juga mendapatkan pelajaran tentang tanggungjawab dan kepercayaan antar anggota. Peran BKM Arta Kawula melalui program ekonomi bergulir dilakukan dengan pendekatan kelompok seperti dalam menumbuhkan ekonomi masyarakat, mengelola konflik, menjalin kerjasama dan memotivasi. Peran positif masyarakat dalam mengakses program ekonomi bergulir ini yang tergabung dalam KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dilakukan melalui pendekatan kelompok. Hal tersebut dirasa lebih efektif dibandingkan pendekatan individu. Pendekatan kelompok juga dapat mempermudah di dalam proses pendampingan dan pengembangan. Selain itu, dengan adanya peran serta masyarakat masalah yang ada dapat dipecahkan secara bersama-sama.

D. Hasil Peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Arta Kawula di Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat.

BKM Arta kawula sebagai motor penggerak dalam melembagakan dan membudayakan kembali nilai-nilai kemanusiaan dan masyarakat sebagai nilai-nilai utama yang melandasi aktivitas penanggulangan kemiskinan meliputi tiga bidang. Penanggulangan kemiskinan oleh BKM dilakukan dengan memberdayakan masyarakat melalui tiga jenis kegiatan pokok yaitu aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek lingkungan yang dikenal dengan konsep Tridaya (UPK,UPS,UPL). Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dengan konsep Tridaya tersebut sebagian besar akan sangat ditentukan oleh lembaga masyarakat yang mampu mendorong perubahan masyarakat untuk membangun dan menumbuh kembangkan keberdayaan dalam ketiga aspek sebagai berikut.

1. Aspek Sosial

Pemberdayaan aspek sosial yang dikenal dengan konsep Tridaya UPS (unit pengelola sosial) adalah salah satu gugus yang dibentuk oleh BKM sebagai unit mandiri untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh BKM mengenai kegiatan-kegiatan dibidang sosial. Peran UPS adalah mengimplementasikan tugas BKM dalam peningkatan peran sosial bagi masyarakat miskin,

menggalang kepedulian, kerelawanan dan solidaritas sosial serta melembagakan nuansa pembelajaran melalui Komunitas Belajar Kelurahan/ Desa (KBK/D)²⁴.

Berbagai kegiatan telah dilakukan oleh BKM untuk mengembangkan sumber daya masyarakat melalui kegiatan ketrampilan kerja. Ini merupakan salah satu usaha untuk menjawab permasalahan kurangnya pengetahuan dan pengelolaan usaha yang baik pada kelompok sasaran. Beberapa upaya peningkatan ketrampilan kerja diantaranya dilakukan dengan mengalokasikan dana untuk kegiatan pelatihan. Kegiatan bidang sosial yang direncanakan oleh BKM Arta Kawula melalui kegiatan untuk meningkatkan SDM yaitu pelatihan ketrampilan.

Program pelatihan ketrampilan yang sudah direncanakan untuk tahun 2020 belum bisa terealisasi. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi covid-19 menjadikan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ini sangat berkurang, terbukti realisasi program yang tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Hal ini juga diungkapkan oleh salah satu masyarakat yang pernah mengikuti kegiatan pelatihan bengkel:

Seperti yang disampaikan FY (masyarakat) sebagai berikut:

“Tahun lalu ada pelatihan bengkel, tapi untuk tahun ini tidak ada pelatihan dikarenakan adanya pandemi covid dan partisipasi masyarakat sangat berkurang, sedangkan kegiatan sosial lebih difokuskan pada program bantuan peduli corona’. (wawancara pada 25 Juli 2020)⁴¹

Pendapat yang sama disampaikan oleh anggota BKM:

‘karena pandemi covid-19, untuk tahun ini program pelatihan ketrampilan tidak berjalan sesuai rencana, dapat dilihat dari KSM sosial yang aktif dan UPS lebih fokus pada program peduli corona dengan memberikan bantuan sembako gratis” (wawancara pada 25 Juli 2020)⁴²

⁴¹ Wawancara dengan bapak Fy (masyarakat) pada tanggal 25 Juli 2020

⁴² Wawancara dengan anggota BKM pada tanggal 25 Juli 2020



Gambar 3.2 Bantuan Sembako untuk Masyarakat Kelurahan Krobokan

2. Aspek Ekonomi

Pemberdayaan aspek ekonomi yang dikenal dengan konsep Tridaya UPK (Unit Pengelola Keuangan) adalah salah satu gugus tugas yang dibentuk oleh BKM sebagai unit mandiri untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh BKM mengenai pengelolaan dana pinjaman bergulir dan administrasi keuangannya. Pemberian pinjaman modal dalam skala mikro kepada masyarakat miskin. Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan oleh pemerintah melalui PNPM yang turun ke wilayah desa untuk dikelola oleh masyarakat sendiri melalui BKM Arta Kawula. Dana bergulir ini diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh anggota kelompok penerima dana untuk mempermudah masyarakat miskin dalam mengakses modal untuk usaha²⁴.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara kepada koordinator BKM Arta Kawula sebagai berikut:

“Kurangnya modal dan pendapatan, menyebabkan sebagian masyarakat berani meminjam uang kepada Bank keliling yang oleh masyarakat disebut rentenir, untuk mengembangkan usahanya. Selain itu masih ada rumah-rumah warga yang tidak layak huni di Kelurahan

Krobokan Kecamatan Semarang Barat.” (wawancara pada tanggal 7 Juni 2020).⁴³

Pendapat yang sama anggota KSM Ibu Wir yaitu:

“Sebelum ada pinjaman sudah memiliki warungtapi kecil banget. Kurangnya modal sehingga berpengaruh terhadap pengembangan usaha, satu-satunya jalan bagi masyarakat ekonomi kecil yaitu banyak yang pinjam kepada Bank keliling.” (wawancara pada tanggal 14 Juni 2020)⁴⁴

Sementara itu hal-hal yang perlu disiapkan untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat di Kelurahan Krobokan Semarang Barat melalui Lembaga Swadaya Masyarakat yang disebut BKM, dengan adanya program ekonomi bergulir BKM Arta Kawula masyarakat menjadi lebih terbantu untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi. Program ekonomi bergulir ini ditujukan kepada masyarakat kelurahan Krobokan untuk membuka usaha atau pun meminjam modal untuk mengembangkan usaha. Pemberian kredit tersebut sifatnya pinjaman dan bergulir, dengan cara masyarakat

⁴³ Wawancara dengan Kepala kelurahan Krobokan Semarang Barat pada tanggal 7 juni 2020

⁴⁴ Wawancara dengan anggota KSM Ibu Wir pada tanggal 14 Juni 2020

misikin diberi pinjaman untuk dikelola bersama kelompok masyarakat yang sudah dibentuk Seperti yang diungkapkan oleh kelurahan Krobokan Semarang Barat (wawancara pada tanggal 17 Juni 2020).⁴⁵

Didasarkan informasi dari anggota KSM menyebutkan program ekonomi bergulir yang dilakukan oleh BKM Arta Kawula diantaranya adalah penambahan modal pinjaman bergulir bagi masyarakat ekonomi kecil sehingga masyarakat yang memiliki usaha bisa mengembangkan usaha dan meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat di Kelurahan Krobokan Semarang Barat.

Pendapat tersebut dikuatkan oleh anggota KSM yaitu

“masyarakat telah merasakan pinjaman modal usaha yaitu Ibu R, Ibu T, bapak MS, dan bapak B (ketua KSM). Untuk bapak MS pengrajin topeng mendapatkan modal pinjaman bergulir untuk usaha kecil awalnya sebesar Rp 1.000.000,-. Setelah usahanya maju pinjem lagi. Ibu R dan Ibu T mendapatkan pinjaman dana tersebut untuk pengembangan usaha warung kelontong. Bapak B mendapatkan pinjaman untuk pengembangan usaha mebel. Dengan adanya dana pinjaman bergulir yang

⁴⁵ Wawancara dengan Kepala kelurahan Krobokan Semarang Barat pada tanggal 7 juni 2020

didapatkan sangat membantu usahanya dan merasa ekonominya menjadi meningkat dengan usaha yang digeluti saat ini. Serta berdampak pada peningkatan usaha yang mereka geluti (wawancara pada tanggal 14 Juni 2020).⁴⁶



Gambar 3.3 Usaha topeng salah satu anggota KSM

⁴⁶ Wawancara dengan bapak B selaku ketua KSM pada tanggal 14 Juni 2020

Wawancara dengan anggota KSM Ibu R pada tanggal 14 Juni 2020

Wawancara dengan anggota KSM Ibu T pada tanggal 14 Juni 2020

Wawancara dengan anggota KSM bapak MS pada tanggal 14 Juni 2020

3. Aspek Lingkungan

Pemberdayaan aspek lingkungan yang dikenal dengan konsep Tridaya UPL (unit pengelola lingkungan) adalah salah satu gugus tugas yang dibentuk oleh BKM sebagai unit mandiri untuk mengelola kegiatan dibidang pembangunan lingkungan perumahan dan pemukiman di wilayahnya. UPL bertanggung jawab dalam hal penanganan rencana perbaikan kampung, penataan dan pemeliharaan prasarana dasar lingkungan perumahan dan pemukiman, tata kelola yang baik (*good governance*) dibidang pemukiman, dan lain-lain²⁴.

Bidang lingkungan adalah bantuan pembangunan prasarana lingkungan bagi masyarakat miskin, merupakan program berkelanjutan untuk menanggulangi kemiskinan secara partisipatif, yang pelaksanaannya melibatkan unsur masyarakat langsung dengan pendampingan oleh BKM sebagai penanggungjawab program. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dalam membuka akses melalui pembangunan lingkungan, sehingga memberi kemudahan masyarakat untuk melakukan aktifitasnya, serta memberi kesempatan bagi masyarakat untuk ikut aktif melaksanakan pembangunan di lingkungannya. BKM mempunyai tiga ranah yang harus dikerjakan dalam pelaksanaan program ekonomi bergulir yaitu program

pembangunan infrastruktur lingkungan, program penataan rumah keluarga miskin, dan peningkatan ekonomi mikro dan menengah melalui dana bergulir.

Sebagaimana hasil wawancara dengan anggota BKM bapak Bayu sebagai berikut

“saya mengusulkan selain perbaikan lingkungan seperti perbaikan jalan dan selokan juga untuk rumah yang betul-betul membutuhkan seperti dindingnya masih bambu, jadi yang diutamakan yang membutuhkan dahulu ”. (wawancara pada tanggal 25 Juli 2020).⁴⁷

Program pembangunan infrastruktur lingkungan, berupa perbaikan sarana lingkungan pembuatan selokan. Tujuan dari pembangunan infrastruktur lingkungan adalah untuk memberdayakan masyarakat agar bisa mengakses pembangunan, sehingga mempermudah mereka untuk melakukan aktifitasnya, selain itu pelaksanaan penataan lingkungan berguna untuk meningkatkan kesehatan dan kebersihan untuk masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Faskel sebagai berikut:

“mengusulkan untuk lebih fokus pada perbaikan jalan dan selokan lingkungan keluharahan krobokan karena

⁴⁷ Wawancara dengan anggota KSM bapak Bayu pada tanggal 14 Juni 2020

kondisinya sangat memprihatinkan“. (wawancara pada tanggal 25 Juli 2020)⁴⁸

Hal senada juga diungkapkan bapak BW (masyarakat) yang mendapat bantuan rehab rumah:

‘bersyukur sangat terbantu oleh program BKM, selain dapat bantuan uang untuk merehab rumah juga dibantu masyarakat secara gotong royong’. (wawancara pada tanggal 25 Juli 2020)⁴⁹

URAIAN			RENCANA	REALISASI
VOLUME			482 M	
BIDI 2017	Rp.	75.780.000,00	Rp.	75.780.000,00
SWADAYA	Rp.	1.909.000,00	Rp.	
LAINNYA	Rp.	-	Rp.	
JUMLAH	Rp.	77.689.000,00	Rp.	

NAMA BKM	= ARTA KAWULA
NAMA KSM	= JONGGRING SALOKO
ALAMAT	= JL. ARIBUANA RT001 RW013
PENGADUAN	= 0857 2700 4117 (SUNARYO)

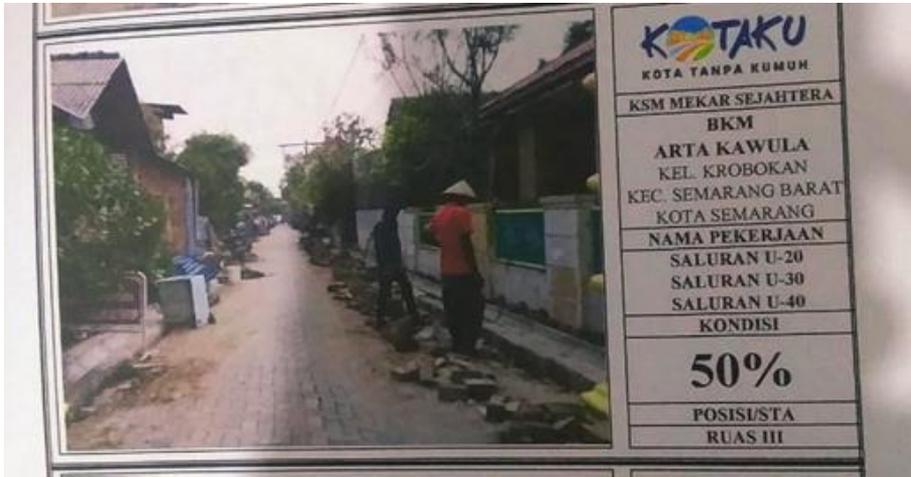
KEGIATAN	= SALURAN U30
LOKASI	= RW 013
WAKTU	= 60 HARI KALENDER

RUAS I	
KOTAKU KOTA TANPA KUMUH	
KSM JONGGRING SALOKO	
BKM	
ARTA KAWULA KEL. KROBOKAN KEC. SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG	
NAMA PEKERJAAN	
SALURAN U-30	
KONDISI	
PAPAN PROYEK	
POSISI/STA	
RUAS I	

Gambar 3.4 Papan informasi proyek pembuatan Saluran di Kelurahan Krobokan

⁴⁸ Wawancara dengan Faskel pada tanggal 25 Juli 2020

⁴⁹ Wawancara dengan bapak Bw (masyarakat) pada tanggal 25 Juli 2020



Gambar 3.5 Pembuatan saluran selokan Kelurahan Krobokan



Gambar 3.6 Perbaikan rumah keluarga miskin

Pelaksanaan kegiatan di atas dilaksanakan langsung oleh masyarakat dengan cara gotong royong. Hal ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan swadaya yang ditetapkan. Tidak hanya dalam pembangunan sarana umum, dalam hal rehab keluarga miskin juga terlihat sifat gotong royong masyarakat dimana mereka membantu pekerjaan rumah, karena dana yang diberikan terbatas. Terlihat dalam masyarakat telah ada rasa kebersamaan untuk mengatasi masalah kemiskinan secara bersama-sama.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti di Kelurahan Krobokan Semarang Barat, pelaksanaan program ekonomi bergulir oleh BKM Arta kawula sesuai dengan kondisi masyarakat. Artinya mereka yang benar-benar tergolong dalam kriteria masyarakat kurang mampu memang benar mendapatkan bantuan. Kegiatan yang dilakukan BKM Artha kawula sesuai dengan apa yang telah ada dalam pelaksanaan program ekonomi bergulir seperti bantuan modal pinjaman bergulir, perbaikan rumah layak huni, perbaikan lingkungan dan pemberian pelatihan pada masyarakat khususnya belum berjalan sesuai rencana tahunan. Program ekonomi bergulir sangat membantu masyarakat dalam mengembangkan usahanya sehingga meningkatkan ekonomi dan mengurangi tingkat pengangguran.

BAB IV

ANALISA PERAN BKM ARTA KAWULA DI KELURAHAN KROBOKAN KECAMATAN SEMARANG BARAT

A. Analisis Peran BKM Arta kawula di Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat

Program penanggulangan kemiskinan perkotaan P2KP atau yang menjadi cikal bakal lahirnya PNPM mandiri perkotaan atau yang sekarang menjadi program KOTAKU (Kota tanpa Kumuh) sesuai dengan peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 tentang pengentasan kemiskinan dan pemukiman kumuh perkotaan.⁵⁰ Didalam program KOTAKU terdapat wadah yang mampu memandirikan masyarakat dalam segi ekonomi, yaitu Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

BKM merupakan suatu lembaga masyarakat yang berbentuk paguyuban, dengan kedudukan sebagai pimpinan kolektif desa / kelurahan, yang bertanggung jawab menjamin keterlibatan semua lapisan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan secara partisipatif yang kondusif. BKM secara khusus ditujukan untuk penanggulangan kemiskinan dan untuk

⁵⁰ Kementerian Pekerjaan Umum. Petunjuk Teknis Pelaksana BKM. Jakarta: Direktorat Jenderal 2002, hlm 2

membangun masyarakat kelurahan pada umumnya. BKM juga menjadi sumber energi dan inspirasi untuk membangun prakarsa dan kemandirian warga yang secara damai, berupaya untuk memenuhi atau kepentingan warga dengan bersama-sama, dan menyatakan kepedulian bersama yang berkaitan dengan kemiskinan.

Adapun pembagaian peran dalam Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) melalui ekonomi bergulir dibagi menjadi 3 bagaian yaitu peran aktif, peran partisipatif, dan peran pasif.

1. Peran Aktif.

Peran aktif adalah peran yang diberikan kepada anggota atau kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat dan lain sebagainya. Peran aktif dari Badan Keswadayaan masyarakat (BKM) sebagai wadah perjuangan kaum miskin dalam menyuarkan aspirasi dan kebutuhan mereka, sekaligus menjadi motor bagi upaya penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan, mulai dari proses penentuan kebutuhan, pengambilan keputusan, proses penyusunan program, pelaksanaan program hingga pemanfaatan dan pemeliharaan.

2. Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan kepada anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri. Peran partisipatif BKM Arta Kawula dalam mengorganisasikan masyarakat membawa dampak yang positif terhadap masyarakat di kelurahan Krobokan, karena masyarakat lebih mudah mengetahui pelaksanaan program ekonomi bergulir yang menjadi program untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dibidang ekonomi. Program ekonomi bergulir ini ditujukan kepada masyarakat kelurahan Krobokan untuk membuka usaha atau pun meminjam modal. BKM dapat menjadi langkah utama untuk mengangkat perkembangan ekonomi masyarakat kelurahan Krobokan melalui pemberian kredit usaha rakyat dalam kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Dengan adanya pengorganisasian tersebut BKM Arta kawula membuat program yang memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat.

3. Peran Pasif

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik. Peran pasif BKM

Arta kawula adalah upaya terstruktur untuk menyadarkan masyarakat akan kondisi yang dihadapinya, potensi dan peluang yang dimiliki. Oleh sebab itu, Cara untuk pengorganisasian masyarakat dapat dilakukan dengan mengumpulkan masyarakat yang setiap RT-nya diwakili oleh ketua RT, sekertaris, bendahara dan masyarakat setempat kelurahan krobokan. Dengan dengan adanya peran positif masyarakat kelurahan krobokan maka hasilnya dapat di ketahui secara jelas dan transparan tentang mengapa terjadi kemiskinan dikelurahan mereka, kesadaran bahwa kemiskinan bukan hanya persoalan kaum miskin, sehingga terbangun pemahaman bahwa kemiskinan adalah usaha bersama dan musuh bersama. Jadi pengorganisasian masyarakat didalam BKM Arta Kawula ini tidak diartikan sebagai wadah organisasi, tetapi lebih merupakan kesepakatan bersama untuk bersatu sebagai warga disuatu kelurahan untuk bersama-sama menanggulangi kemiskinan sebagai suatu gerakan moral.

B. Analisis Hasil Peran BKM Arta Kawula di Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat.

BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) adalah satu program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sistem pembangunan *bottom up*, yakni program yang melibatkan

masyarakat sebagai subyek dalam proses pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan juga tahap evaluasi pembangunan. Program tersebut memiliki tujuan untuk mencapai masyarakat berdaya. Akan tetapi dalam menuju proses tersebut tentunya tidak akan mudah, oleh karenanya diperlukan sebuah proses / tahapan dan waktu yang panjang untuk mewujudkan tujuan tersebut. Adapun tiga bidang yang dikelola oleh BKM melalui program ekonomi bergulir sebagai berikut:

1. Aspek Sosial

Berdasarkan penelitian yang didapat bahwa dilihat dari aspek sosial, BKM berorientasi pada upaya membangun solidaritas sosial dan keswadayaan masyarakat sehingga dapat tercipta masyarakat efektif secara sosial sebagai pondasi yang kokoh dalam upaya menanggulangi kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan. Pemberdayaan aspek sosial yang dikenal dengan konsep Tridaya UPS (unit pengelola sosial) di kelurahan krobokan untuk tahun ini lebih fokus kepada program peduli Corona dengan melaksanakan bantuan sosial berupa pembagaian sembako gratis. Sedangkan program pelatihan ketrampilan yang sudah direncanakan untuk tahun 2020 belum berjalan sesuai rencana atau seperti yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi covid-19 dan partisipasi masyarakat juga sangat berkurang.

Pelatihan bertujuan untuk memperbaiki dan mengembangkan sikap, tingkah laku, keterampilan, dan pengetahuan kepada peserta pelatihan sehingga dapat mandiri dalam berwirausaha.⁵¹ Maka melalui kegiatan pelatihan ketrampilan diharapkan masyarakat dapat meningkatkan keahlian-keahlian, pengetahuan, pengalaman, atau perubahan sikap seseorang untuk dapat mandiri dalam berwirausaha sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan mereka dikemudian hari. Masyarakat yang sudah dibekali ketrampilan atau yang sudah punya usaha, mereka mampu mengembangkan usahanya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya.

2. Aspek Ekonomi

Berdasarkan penelitian yang didapat bahwa dengan adanya peran BKM Arta Kawula ini merupakan suatu kelembagaan yang dirancang untuk dapat menjadi penggerak pembangunan masyarakat mandiri yang mampu mengatasi kemiskinan. Misi dari lembaga ini adalah menumbuhkan kembali ikatan sosial antar warga masyarakat untuk bekerja sama dalam kebaikan bersama serta berupaya menumbuhkan partisipasi masyarakat

⁵¹ Anwas, Oos M. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung : Alfabeta. 2013, hlm 51

dengan tujuan memberdayakan rakyat untuk berperan dalam pembangunan mereka sendiri secara lebih berarti. Program yang paling diunggulkan dan manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat di bidang ekonomi yaitu modal pinjaman bergulir.

Pemberdayaan aspek ekonomi yang dikenal dengan konsep Tridaya UPK (Unit Pengelola Keuangan) melalui modal pinjaman bergulir ini sangat membantu masyarakat dalam mengembangkan atau mendirikan usaha. BKM memiliki peran yang penting dalam pengembangan ekonomi masyarakat Kelurahan Kerobokan, dengan adanya modal pinjaman bergulir dikhususkan pada masyarakat yang kekurangan modal atau tidak memiliki pendapatan masyarakat yang sangat merasakan manfaatnya dengan adanya program tersebut.

Modal pinjaman bergulir yang diberikan pada masyarakat sangat membantu artinya masyarakat yang mempunyai keinginan membuka usaha atau sudah mempunyai usaha tetapi tidak ada modal, dengan bantuan modal pinjaman bergulir sangat bermanfaat untuk usaha masyarakat. Program ekonomi bergulir yang digerakkan oleh BKM Arta Kawula membuat masyarakat miskin kehidupannya lebih meningkat.

Salah satu indikator penting dari peran BKM dalam pengembangan ekonomi masyarakat adalah seberapa besar

tingkat partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat terlibat secara aktif baik fisik maupun psikis. Partisipasi mengandung makna keterlibatan adanya kesadaran untuk berubah, terjadinya proses belajar menuju kearah perbaikan dan peningkatan kualitas kehidupan yang lebih baik. Pemberdayaan juga menekankan pada proses, bukan semata-mata hasil (*output*) dari proses tersebut. Oleh karena itu ukuran keberhasilan pengembangan ekonomi adalah seberapa besar partisipasi atau keberadaan yang dilakukan oleh individu atau masyarakat. Meskipun pengembangan ekonomi masyarakat bukan semata-mata konsep ekonomi, tetapi seringkali ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan ekonomi juga tidak dapat dilakukan secara parsial. Pengembangan ekonomi perlu dilakukan secara berkesinambungan melalui tahapan-tahapan sistematis dalam mengubah perilaku dan kebiasaan masyarakat kearah yang lebih baik.

3. Aspek Lingkungan

Berdasarkan penelitian yang didapat bahwa aspek lingkungan yang dikenal dengan konsep Tridaya UPL (unit pengelola lingkungan) fokus pada penyediaan sarana fisik yang dapat meningkatkan akses/pelayanan infrastruktur dasar yang berdampak langsung pada pengembangan kegiatan sosial

dan ekonomi produktif warga miskin serta meningkatkan akses masyarakat terhadap lingkungan hunian yang sehat, tertib, aman dan lestari. Jenis dan volume penyediaan sarana prasarana bangunan fisik dalam kegiatan pemberdayaan lingkungan di kelurahan obyek penelitian bervariasi hal ini tergantung dari kebutuhan, luas wilayah, jumlah penduduk dan merupakan hasil dari usulan masyarakat. Jenis sarana prasarana bangunan fisik yang dibangun dalam program ini adalah terdiri perbaikan lingkungan dan rehab rumah warga miskin yang masih ber dinding bambu (gedhek).

BKM dalam menumbuhkan kemandirian masyarakat di bidang pembangunan fisik, pada dasarnya merupakan wadah perjuangan dan wadah aspirasi warga masyarakat khususnya yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan dengan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi membangun dan menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan, ikatan-ikatan sosial dan menggalang solidaritas serta kesatuan sosial sesama warga agar saling bekerjasama demi kebaikan, kepentingan, kebutuhan bersama. Dan pada akhirnya akan memperkuat keswadayaan dan mewujudkan pembangunan terpadu dan berkelanjutan dengan mengajak masyarakat untuk dapat menjaga/merawat lingkungannya dengan demikian maka akan terwujud kemandirian masyarakat.

Tabel 4.1 Perbandingan Tindakan Sebelum dan sesudah Adanya Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)

No	Sebelum ada BKM	Sesudah ada BKM
1.	Kurangnya modal dan pendapatan, menyebabkan sebagian masyarakat berani meminjam uang kepada Bank keliling.	Masyarakat tidak perlu ke bank meminjam uang untuk mendirikan usaha cukup dengan adanya suatu usaha dijalankan dan membentuk suatu kelompok swadaya masyarakat kita dengan mudah mendapatkan pinjaman dana sehingga usaha dapat berkembang
2.	Belum memiliki usaha	Program ekonomi bergulir membantu masyarakat dalam meningkatkan penghasilan orang-orang di sekitarnya dengan cara menciptakan lapangan pekerjaan
3.	Memiliki usaha tapi tidak berkembang	Program ekonomi bergulir sangat membantu dalam mengembangkan usaha

4.	Tidak memiliki ketrampilan tambahan	Masyarakat diberikan modal atau yang sudah punya usaha, mereka mampu mengembangkan usahanya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya
5.	Banyak masyarakat kurang mampu	Masyarakat kurang mampu sangat terbantu
6.	Rumah masih ada yang berinding bambu	Masyarakat sangat terbantu dengan adanya penataan rumah keluarga miskin, dan peningkatan ekonomi mikro

Sumber : hasil wawancara diolah 2020

BKM ini merupakan suatu kelembagaan yang dirancang untuk dapat menjadi penggerak pembangunan masyarakat mandiri yang mampu mengatasi kemiskinannya. Misi dari lembaga ini adalah menumbuhkan kembali ikatan sosial antar warga masyarakat untuk bekerja sama dalam kebaikan bersama serta berupaya menumbuhkan partisipasi masyarakat dengan tujuan memberdayakan rakyat untuk berperan dalam pembangunan mereka sendiri secara lebih berarti.

Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari Program ekonomi bergulir yang digerakkan oleh BKM meningkatkan

kesejahteraan ekonomi masyarakat. Program ekonomi bergulir ini ditujukan kepada masyarakat kelurahan Krobokan untuk membuka usaha atau pun meminjam modal. Dengan adanya BKM Arta kawula dapat dijadikan sebagai langkah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat kelurahan Krobokan melalui pemberian modal pinjaman bergulir dalam kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Pemberian kredit tersebut sifatnya pinjaman dan bergulir, dengan cara masyarakat diberi pinjaman untuk dikelola bersama kelompok masyarakat yang sudah dibentuk sehingga masyarakat mampu membuka dan mengembangkan usaha sendiri. Masyarakat yang dulunya hanya bergantung pada pinjaman bank, sekarang sudah banyak yang dapat mencukupi kehidupan sehari-harinya. Ekonomi masyarakat menjadi semakin meningkat dan sejahtera dengan adanya program ekonomi bergulir. Sedangkan rencana tahunan BKM Arta Kawula yang belum berjalan sesuai rencana adalah pelatihan ketrampilan. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi covid-19, maka untuk kegiatan sosial lebih difokuskan pada program bantuan sosial sembako gratis untuk masyarakat Kelurahan krobokan. Dengan adanya BKM dapat dijadikan sebagai langkah awal untuk membuka lapangan usaha/kerja bagi masyarakat miskin di kelurahan krobokan dengan program yang diberikan yang akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Kelurahan Krobokan Semarang Barat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Krobokan Semarang Barat, maka dapat diperoleh simpulan sebagai berikut.

1. Peran BKM Arta Kawula dalam pengembangan ekonomi masyarakat kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang melalui program ekonomi bergulir. Adapun pembagaian peran dalam Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) melalui ekonomi bergulir dibagi menjadi 3 bagaian yaitu peran aktif, peran partisipatif, dan peran pasif. Pemberian pinjaman modal bergulir bertujuan agar sebagian besar sebagai pedagang / wirausaha kecil yang tidak memiliki modal bisa membuka lapangan pekerjaan sendiri dan tidak lagi bergantung dengan orang lain. Peran BKM Arta Kawula dalam mengorganisasikan warga secara partisipatif membawa dampak yang positif terhadap masyarakat di kelurahan krobokan, karena masyarakat lebih mudah mengetahui pelaksanaan program ekonomi bergulir yang menjadi

program untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dibidang ekonomi.

2. Hasil Peran BKM Arta Kawula di Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang dalam pengembangan ekonomi masyarakat meliputi tiga aspek yaitu: aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek lingkungan. Pemberdayaan aspek sosial yang dikenal dengan konsep Tridaya UPS (unit pengelola sosial) di kelurahan krobokan untuk tahun ini lebih fokus kepada program peduli Corona dengan melaksanakan bantuan sosial berupa pembagaian sembako gratis. Sedangkan program pelatihan ketrampilan yang sudah direncanakan untuk tahun 2020 belum berjalan sesuai rencana atau seperti yang diharapkan. Pemberdayaan aspek ekonomi yang dikenal dengan konsep Tridaya UPK (unit pengelola keuangan) yaitu program ekonomi bergulir yang paling diunggulkan dan manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat adalah di bidang ekonomi yaitu modal pinjaman bergulir. Peran BKM Arta Kawula dalam memberikan modal pinjaman bergulir ini sangat membantu masyarakat dalam mengembangkan atau mendirikan usaha. Modal pinjaman bergulir dikhususkan pada mereka yang kekurangan modal atau tidak memiliki pendapatan. Banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya, dengan adanya

modal pinjaman bergulir tersebut. Pemberdayaan aspek lingkungan yang dikenal dengan konsep Tridaya UPL (unit pengelola lingkungan) yaitu program perbaikan lingkungan dan rehab rumah warga miskin yang masih berdingding bambu (gedhek). BKM Arta kawula berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Kelurahan Krobokan Semarang Barat.

B. Saran

Setelah dilakukan penelitian tentang Peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Krobokan Semarang Barat pemaka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi BKM diharapkan dalam melaksanakan program ekonomi bergulir tidak hanya dengan pendekatan ekonomis tetapi juga dengan pendekatan karakter. Dengan kata lain, moral kemandirian pada diri masyarakat harus ditanamkan. Supaya dalam diri masyarakat tidak tertanam rasa malas, perasaan yang selalu merasa kurang, dan lain sebagainya. Selain itu, masyarakat juga perlu dibekali pelatihan ketrampilan.
2. Bagi Pemerintah Kelurahan Krobokan diharapkan untuk lebih menekankan klasifikasi penggolongan masyarakat yang

bener-bener membutuhkan bantuan, guna meminimalkan jumlah penduduk miskin yang ada di Kelurahan Krobokan

3. Bagi Masyarakat, diharapkan lebih meningkatkan kesadaran untuk membangun dirinya. Dengan adanya modal pinjaman bergulir masyarakat bisa memanfaatkan dengan semaksimal mungkin dimanfaatkan untuk modal dan mengembangkan usaha.

C. Penutup

Syukur Alhamdulillah atas segala kenikmatan serta limpahan rahmat AllahSWT sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Harapan penulis, semoga skripsi ini membawa manfaat bagi kita semua, khususnya manfaat untuk kemajuan dakwah islam.

Amiin yaa robbal 'aalamiin.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)
- Anwas, Oos M. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung : Alfabeta. 2013.
- Diah Putriana Afriani, Peranan BKM dalam Menumbuhkan Kemandirian Masyarakat Dibidang Pembangunan Fisik Melalui P2KP di Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. 2009
- Direktorat Jendral Perumahan dan Permukiman Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah. 2002 b. *Pedoman Umum P2KP-2*. Jakarta : P2KP
- Direktorat Jendral Perumahan dan Permukiman Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah. 2002 c. *Petunjuk Teknis Pelaksana "Badan Keswadayaan Masyarakat"*. Jakarta : P2KP.
- Kementerian Pekerjaan Umum. Petunjuk Teknis Pelaksana BKM. Jakarta: Direktorat Jenderal 2002.
- Kementerian Pekerjaan Umum. Buku pedoman PNPM-MP. Jakarta: Direktorat Jenderal 2010.
- Kementerian Pekerjaan Umum. Pedoman Teknis Tinjauan Partisipatif, PNPM Perkotaan. Jakarta: Direktorat Jenderal 2007.

- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Petunjuk Pelaksana KOTAKU: Direktorat Jenderal 2016.
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja RosdaKarya. 2010
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja RosdaKarya. 2013.
- Maghfirotul, Audit Manajemen atas program penanggulangan kemiskinan (PRONANGKIS) di Badan Keswadayaan Masyarakat Kedung Jaya Desa Kedungpuji Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen. Skripsi UNY 2015.
- Nur Achla Chalia, Peranan BKM dalam penanggulanagn kemiskinan berbasis kemandirian di desa pecangaan Kabupaten Jepara. Skripsi Universitas Negeri Semarang jurusan Politik dan Kewarganegaraan 2015.
- Fredian Tonny, *Pengembangan Masyarakat*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia : 2014)
- Gustina, Indah. *Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan Medan Maimun. Tesis*. Medan: Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan. 2008
- Purnomo, Heru. *Keefektifan Program Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin. Artikel Jurnal Skripsi*. Yogyakarta. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Yogyakarta. 2013'
- Budi Yana Saifullah. *Pengembangan Livelihood dalam Program KOTAKU* Jakarta, 5 April 2017

- Syafar, Muhammad, *Pemberdayaan Masyarakat pada program pembiayaan mikro (studi tentang pelaksanaan program pembiayaan mikro pada anggota Koperasi Baitul ikhtiyar kabupaten Bogor – Jawa Barat)*. Universitas Indonesia, 2012.
- Soekanto. Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. 2007.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta. 2013
- Soetomo, *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010.
- Sarwono*, Sarlito W. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013
- Tim Pengembangan Masyarakat, 2005
- Vrisca Ariestiy, *Peran Badan Keswadayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Kemiskinan DiKelurahan Jambangan Kota Surabaya*. Skripsi UNESA 2015
- Wijayati, dkk. *Upaya Badan keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam Pemberdayaan Masyarakat*. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 10, Hal. 35-40. 2011
- Zidni Maghfirotul Anam, *Analisis Tentang Efektivitas Audit Manajemen Atas Program Penanggulangan Kemiskinan di BKM Kedung Jaya Desa Kedungpuji, Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen*. 2015.

B. Wawancara

Wawancara kepada Heri Herantoro selaku koordinator BKM Arta Kawula pada tanggal 6 Juni 2020

Wawancara kepada Heri Herantoro selaku koordinator BKM Arta Kawula pada tanggal 7 Juni 2020

Wawancara dengan anggota KSM Ibu Wir pada tanggal 14 Juni 2020

Wawancara dengan Kepala kelurahan Krobokan Semarang Barat pada tanggal 7 Juni 2020.

Wawancara dengan anggota KSM pada tanggal 14 Juni 2020

Wawancara anggota KSM Ibu Rini pada tanggal 14 Juni 2020

Wawancara dengan anggota KSM bapak Bayu pada tanggal 14 Juni 2020

Wawancara dengan anggota KSM Ibu Wir pada tanggal 14 Juni 2020

Wawancara dengan bapak B selaku ketua KSM pada tanggal 14 Juni 2020

Wawancara dengan anggota KSM Ibu R pada tanggal 14 Juni 2020

Wawancara dengan anggota KSM Ibu T pada tanggal 14 Juni 2020

Wawancara dengan anggota KSM bapak MS pada tanggal 14 Juni 2020

Wawancara dengan Faskel pada tanggal 25 Juli 2020

Wawancara dengan bapak BW (masyarakat) pada tanggal 25 Juli 2020

Wawancara dengan bapak Bayu anggota KSM pada tanggal 25 Juli 2020

Wawancara dengan anggota BKM pada tanggal 25 Juli 2020

Wawancara dengan bapak FY (masyarakat) pada tanggal 25 Juli 2020

Wawancara dengan bapak W anggota BKM pada tanggal 25 Juli 2020

Wawancara dengan bapak YP ketua KSM pada tanggal 25 Juli 2020

LAMPIRAN

DAFTAR WAWANCARA

A. Peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)

1. Bagaimana Peran BKM dalam Menumbuhkan Ekonomi Masyarakat?
2. Bagaimana Peran BKM dalam mengelola konflik antar anggota?
3. Bagaimana Peran BKM dalam menjalin kerja sama dan saling memotivasi?
4. Bagaimana Peran BKM dalam pengembangan masyarakat melalui program ekonomi bergulir?

B. Hasil Peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)

1. Kegiatan apa saja yang telah dilakukan di bidang sosial?
2. Kegiatan apa saja yang telah dilakukan di bidang ekonomi?
3. Kegiatan apa saja yang telah dilakukan di bidang lingkungan?

DATA RESPONDEN

1. Koordinator BKM
2. Anggota BKM
3. Anggota KSM
4. Ketua KSM
5. Kepala Kelurahan
6. Faskel
7. Masyarakat



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website : www.fakdakom.walisongo.ac.id

Nomor : B-1544/Un.10.4/K/PP.00.9/ 5 /2020

Semarang, 22 Mei 2020

Lamp. : 1 (satu) bendel

Hal : *Permohonan Ijin Riset*

Kepada Yth.

Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Arta Kawula
Kelurahan Krobokan
Jl. Wiroto Raya No. 16, RT.05, RW.05, Krobokan
Kec. Semarang Barat - Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang menerangkan
bahwa dalam rangka penyusunan skripsi, mahasiswa berikut:

N a m a : Rachmat Darul 'Adhim
NIM : 1601046050
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)
Lokasi Penelitian : BKM " Arta Kawula "
Judul Skripsi : Peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Dalam
Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Krobokan,
Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang.

Bermaksud melakukan riset penggalian data di BKM " Arta Kawula " dan Warga
Masyarakat Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang.
Sehubungan dengan itu kami mohonkan ijin bagi yang bersangkutan untuk melakukan
kegiatan dimaksud.

Demikian atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan,
Kepala Bagian Tata Usaha

SITI BARARAH

Tembusan Yth. :
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang



BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT
BKM "ARTA KAWULA"
KELURAHAN KROBOKAN

Alamat: Jl. Wirata Raya No.24 Semarang 50141. Telp. (024) 762 4524

Nomor : 01 / BKM – AK/IX – 2020
Lampiran : —
Perihal : **Riset Dalam Rangka Penyusunan Skripsi**

Semarang, 10 September 2020

Kepada Yth;
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang
Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50285
Di Semarang

Assalamulakum Warohmatullohi Wabarokatuh

Menunjuk Surat dari Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang Nomor. B-1544/Ur.10.4/K/PP.00.9/5/2020 tanggal 22 Mei 2020, bersama ini disampaikan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Rachmat Darul 'Adhim
NIM : 1601046050
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Telah melaksanakan kegiatan Riset di Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) "Arta Kawula" Krobokan alamat : Jl. Wirata Raya No. 24 RT.05RW.05 – Kelurahan Krobokan - selama satu bulan terhitung mulai tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020.

Kegiatan Riset dilakukan dalam rangka Penyusunan Skripsi di Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) "Arta Kawula" Kelurahan Krobokan dengan Judul Skripsi :

Peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang.

Demikian Surat ini dibuat urtuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamua aikum Warohmatullohi Wabarokatuh





Wawancara dengan Anggota BKM (Bp. H.Busaeri)



Wawancara dengan Koordinator BKM (Hery Herantoro,SH)



Wawancara dengan Anggota BKM (Drs. Priyono)



Kantor BKM Arta Kawula



FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
BEKERJASAMA DENGAN
LEMBAGA PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN AL QURAN (LP3Q)



Sertifikat

Nomor : B-3166/Un.10.4/D/PP.00.9/12/2018

Dibawakan Kepada

RACHMAT DARUL 'ADHIM

Telah mengikuti kegiatan praktikum bimbingan baca tulis al Qur'an (BTQ) yang diselenggarakan oleh fakultas dakwah dan komunikasi UIN Walisongo Semarang bekerjasama dengan lembaga pelatihan dan pengembangan pendidikan al-Qur'an (LP3Q) Semarang pada tanggal 12 - 23 November 2018 dan dinyatakan **lulus** dengan predikat :

CUKUP

Semarang, 17 Desember 2018

Direktur LP3Q,

Bahul Fawad, SH., M.Si.

Dr. H. Awangudin Pimay, Lc., M.Ag.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Rochmat Darul 'Adhim
NIM : 1601046050
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 13 Agustus 1998
Alamat : Jl. Gedung Batu Utara II RT.03/ RW.06
Kelurahan Ngemplak Simongan
Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang
Jenjang Pendidikan : 1. SDIT Almadina Sampangan Semarang
Tahun 2004 Lulus Tahun 2010
2. SMP JH.Isriati Semarang Tahun 2010 Lulus
Tahun 2013
3. SMK Islamic Centree Semarang Tahun 2013
Lulus Tahun 2016

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya.

Semarang, 20 September 2020

Rachmat Darul 'Adhim
NIM. 1601046050